

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOHARJO  
KABUPATEN SUKOHARJO**

(studi kasus desa bulakrejo tentang pemberantasan buta aksara oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2007/2008)



**Disusun Oleh :**

**Siti Zuhriyati Rosyita**

**D.0105022**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2009**

## PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Pembimbing

Drs. Muchtar Hadi, M.Si  
NIP. 195303201985031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Drs. Sudarto, M.Si (.....)  
NIP.195502021985031006 Ketua
2. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos.,M.PA (.....)  
NIP.197406012008012016 Sekretaris
3. Drs. Muchtar Hadi, M.Si (.....)  
NIP. 195303201985031002 Penguji

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Drs. H. Supriyadi SN., SU  
NIP. 195301281981031001

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini dengan tulus penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT, Terimakasih Ya Robb..Engkau telah memberiku kekuatan dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini.
- Ayah Bundaku Tersayang yang telah memberi dukungan penuh untukku dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih untuk perjuangan serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untukku.
- Adikku satu-satunya, Siti Rhovi'Anna Rosyaningsih yang senantiasa membantuku dalam segala hal.
- Tri Hariyadi A. Md yang telah memberiku semangat. Perhatian dan kasih sayangmu sangat berarti untukku.
- Sahabat-sahabat seperjuanganku, tempatku berbagi keluh-kesah (Arum, Anton dan Watik).
- Para Guru dan Dosenku, Terima kasih...
- Almamaterku
- Masa depanku

### MOTTO

“Belajarlah dari Kesalahan Masa Lalu”

“Hanya Orang Bodohlah yang Jatuh pada Kesalahan yang Sama”



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Evaluasi**

**Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”**

Akhirnya dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Muchtar Hadi, M.Si, selaku pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, bantuan, waktu, dan kesabarannya.
2. Drs. H. Supriyadi SN., SU, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Sudarto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Rutiana Dwi W. S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing Akademik.
5. Hj. Isriwiji, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo yang telah memberikan ijin, menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penelitian.
6. Muhammad Rosyad, BA, selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo yang telah memberi bimbingan selama pelaksanaan penelitian.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi ini.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juli 2009

Penulis



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Pikir .....	30
G. Definisi Konseptual .....	32
H. Definisi Operasional .....	34
I. Metodologi Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian .....	35
2. Lokasi Penelitian .....	36
3. Teknik Cuplikan .....	37
4. Jenis Data .....	37
5. Teknik Pengumpulan Data .....	38
6. Teknik Analisa Data .....	40
7. Validitas Data .....	42
<b>BAB II DESKRIPSI LOKASI</b>	
A. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.....	43
1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.....	43



2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.....	44
3.	Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	45
4.	Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	50
5.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.....	56
<b>B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan</b>		
	Sukoharjo.....	58
1.	Letak Geografis Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.....	58
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.....	58
3.	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.....	64
<b>C.</b>	<b>Kecamatan Sukoharjo.....</b>	<b>65</b>

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

<b>A.</b>	<b>Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara .....</b>	<b>69</b>
1.	Langkah Persiapan .....	69
a.	Sosialisasi .....	69
b.	Pendataan Calon Warga Belajar .....	74
c.	Pengajuan Proposal .....	78
2.	Langkah Pelaksanaan .....	79
a.	Tahap I (Tahap Pemberantasan) .....	79
b.	Tahap II (Tahap Pembinaan ) .....	81

c.	Tahap III (tahap Pelestarian) .....	83
3.	Langkah Monitoring dan Evaluasi.....	85
4.	Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut.....	88
B.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara .....	91
1.	Evaluasi Konteks ( <i>Contex</i> ) .....	91
a.	Tujuan Pelaksanaan Program .....	92
b.	Sasaran Pelaksanaan Program .....	94
2.	Evaluasi Masukan ( <i>Input</i> ) .....	95
a.	Kondisi Kelompok Sasaran .....	95
b.	Latar Belakang Pendidikan Pelaksana Program (Tutor) .....	98
c.	Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Program .....	100
d.	Dana Pelaksanaan Program .....	101
3.	Evaluasi Proses ( <i>Process</i> ) .....	105
a.	Pelaksanaan Program .....	105
b.	Hambatan Pelaksanaan Program .....	110
4.	Evaluasi Produk ( <i>Product</i> ) .....	116
a.	Dampak Pelaksanaan Program .....	116

#### BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan .....	120
B.	Saran .....	125

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekap Jumlah Penduduk Buta Aksara Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007/2008.....	3
Tabel 2	Data Tenaga Pengajar (tutor) Program Pemberantasan Buta Aksara Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007/2008.....	99
Tabel 3	Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan	

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun

2007/2008..... 119



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	32
Gambar 2	Skema Model Analisis Interaktif.....	41
Gambar 3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.....	57
Gambar 4	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.....	64



**ABSTRAK**

**Siti Zuhriyati Rosyita, D 0105022, Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Desa Bulakrejo tentang Pemberantasan Buta Aksara Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007/2008), Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2009.**

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan pendidikan, kehidupan manusia dapat berubah menjadi lebih baik. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, masih jauh perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup di Indonesia yang sempit ini, masih saja ada masyarakat yang terbelakang yaitu masih banyak masyarakat yang menyandang status buta aksara. Melihat permasalahan itu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berupaya untuk menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara di seluruh Kecamatan Sukoharjo guna meningkatkan tingkat keaksaraan masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Karena evaluasi dapat menunjukkan dimana dan bagaimana harus dilakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo kemudian mengevaluasinya dengan menggunakan model CIPP (*Contex, Input, Process, and Product*).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik cuplikan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yang terdiri dari empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan, sedangkan untuk menguji validitas data digunakan teknik *triangulasi data*.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan diselenggarakannya program Pemberantasan Buta Aksara telah tercapai, yaitu adanya kemajuan warga belajarnya dalam bidang sosial maupun ekonomi. Secara sosial, masyarakat yang dulunya buta aksara sekarang mampu membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan secara ekonomi, masyarakat mampu berwirausaha secara mandiri dengan menerapkan materi keterampilan fungsional yang telah diberikan pada waktu proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.

**ABSTRACT**

**SITI ZUHRIYATI ROSYITA, D0105022, AN EVALUATION ON THE IMPLEMENTATION OF ILLITERACY ELIMINATION PROGRAM OF THE REGION TECHNICAL ORGANIZER UNIT OF THE OFFICIAL OF EDUCATION IN SUKOHARJO SUBDISTRICT, SUKOHARJO (A CASE STUDY IN BULAKREJO 2007/2008),**

**ADMINISTRATION STUDY DEPARTMENT, SOCIAL AND POLITICS FACULTY,  
SEBELAS MARET UNIVERSITY, 2009.**

Education has been an important thing for human being, that it could make them get improved. By paying attention to education in Indonesia today, we know that it is still required an improvement through educational establishment program. There are still number of illiteracy in society. For that reason the Region Technical Organizer Unit of the official of education in Sukoharjo are attempting to commit the Illiteracy Elimination Program in the entire of Sukoharjo district. It is due to obstacles in implementing a program so that evaluation requires to be committed. The reason is the evaluation of a program will show where and how the program should be improved.

The purpose of the research is evaluate the implementation of the Illiteracy Elimination Program of the Region Technical Organizer Unit of the Official of Education in Sukoharjo subdistrict by using the CIPP (*Contex, Input, Process, and Product*) evaluation model.

The type of the study is *qualitative descriptive*. The data is collected through interview, observation and documentation. The study uses the *qualitative descriptive* method with *interactive data analysis* technique that is the process of the data analysis through four stages; collecting data, reducing data, presenting data, and constructing conclusion. The *triangular data* technique is used to testing the data validity.

Based on the research, it can be concluded that what is expected by the government through the implementation of the Illiteracy Elimination Program is reached. The indicators can be seen socially and economically. Socially, the society has been able to read, write, and count. Economically, the society is able to run private enterprise autonomously by applying the functional skills given in the learning process of the Illiteracy Elimination Program of the the Region Technical Organizer Unit of the Official of Education in Sukoharjo subdistrict.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hal yang utama didalam kehidupan era sekarang ini. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan merupakan unsur dasar yang menentukan kecekatan seseorang berpikir tentang dirinya dan lingkungannya. seseorang yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik maka akan mampu pula mengubah keluarganya, kelak dapat mengubah daerahnya kemudian dapat mengubah negara ke arah yang lebih baik. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan dan keterampilan sebab hal itu merupakan modal utama untuk bersaing dengan negara lain. Misalnya Amerika Serikat mempunyai penemuan-penemuan baru di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat digunakan sebagai “nilai jual” ke negara lain tanpa menghilangkan keoriginalan penemuan awal yang mereka lakukan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, masih jauh perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup di Indonesia yang sempit ini, masih saja ada masyarakat yang terbelakang yaitu masih banyak masyarakat yang menyandang status buta aksara. (<http://google.com/gwt/>. 24 Juli 2009)

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka dalam upayanya meningkatkan tingkat keaksaraan di Indonesia, Direktorat Pendidikan Masyarakat telah mengintensifkan pelaksanaan program Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional. Program ini merupakan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga masyarakat penyandang buta aksara untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan keaksaraan (membaca, menulis, menghitung, tematik) serta keterampilan fungsional yang dibutuhkan terkait dengan kemampuan keaksaraan itu, sehingga



dengan kemampuan keaksaraan itu mereka dapat menguasai pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam habitat dan komunitas hidupnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berupaya untuk menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara di seluruh Kecamatan Sukoharjo. Sebelum dilaksanakan program ini maka dilakukan sosialisasi dan pendataan terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat buta huruf masyarakatnya yang kemudian sebagai acuan untuk menentukan daerah mana yang harus segera dilaksanakan program Pemberantasan Buta Aksara. Berikut ini hasil pendataan pada tahun 2007/2008 :

Tabel 1

Rekap Jumlah Penduduk Buta Aksara Berdasarkan Jenis Kelamin  
Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007/2008

NO	DESA/KELURAHAN	L	P	JUMLAH
1.	Bulakrejo	33	97	130
2.	Sonorejo	16	57	73
3.	Mandan	12	18	30
4.	Bulakan	15	23	38
5.	Banmati	22	19	41
6.	Dukuh	15	19	34
7.	Sukoharjo	-	21	21
8.	Begajah	3	24	27
	JUMLAH			394

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat buta aksara di Kecamatan Sukoharjo cukup tinggi. Dari Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari 14 Kelurahan, dan terdapat 8 Kelurahan yang masih terdapat 394 penduduk penyandang buta aksara. Oleh karena itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo sebagai salah satu wadah pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan perlu menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara, karena lebih dari 50% Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo terdapat penduduk yang masih menyandang buta aksara.

Melihat banyaknya masyarakat di Kecamatan Sukoharjo yang menyandang status buta aksara ini, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo melaksanakan strategi untuk mengurangi tingkat buta huruf masyarakatnya, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa program pemerintah tersebut adalah program Pemberantasan Buta Aksara. Untuk memaksimalkan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo harus mempunyai manajemen strategik yang baik.

Sebagaimana dapat kita lihat rencana strategik Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo dalam menangani buta aksara, yaitu:

- Program pembelajaran yang diberikan kepada warga belajar adalah materi membaca, menulis, berhitung, dan analisis tematik.
- Target yang ingin dicapai oleh pemerintah dari pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yaitu :

Mampu mengurangi jumlah masyarakat buta aksara bahkan menuntaskan buta aksara ke seluruh lapisan masyarakat serta membekali warga belajar dengan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat di Kecamatan Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo.

- Potensi yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini yaitu :

1. Banyaknya guru yang bersedia membantu menjadi tutor dan penyelenggara program keaksaraan
2. Kepedulian lembaga lain.

Seperti : Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW

3. Ada sebuah Perguruan tinggi yang berperan serta dengan menerjunkan mahasiswa KKN pada tiap-tiap kelompok belajar menjadi tutor pembantu dalam proses pembelajaran
4. Bantuan tenaga pengajar dari GOW
5. Bantuan dari AISYIYAH
6. Bantuan dari PKK

Jika dilihat dari segi ketersediaan tutor (tenaga pengajar), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam hal ketersediaan tenaga pengajar. Banyak kalangan yang bersedia untuk berpartisipasi membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah guna menangani masalah buta aksara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala lain yang menghambat pelaksanaan program pemerintah ini, antara lain :

1. Waktu pembelajaran yang tidak sesuai jadwal.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar warga belajar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang kecil, buruh, sehingga pada waktu musim tanam dan musim panen banyak warga belajar yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar pada waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Sehingga pada tahap pertama (tahap pembinaan) pelaksanaan program ini, warga belajar belum bisa membaca, menulis dan berhitung secara tulis. Untuk tahap keduanya (tahap pemberantasan), warga belajar sudah bisa membaca kalimat sederhana dan menghitung

hitungan sederhana. Kemudian di tahap ketiga (tahap pelestarian), diharapkan warga belajar sudah dapat membaca dan berhitung secara mandiri. Setelah selesai tahap ketiga dan warga belajar dinyatakan lulus ujian, maka warga belajar dapat mengikuti program kesetaraan paket A dengan menduduki kelas 4 Sekolah Dasar.

2. Kurangnya kesadaran warga belajar dalam mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara ini. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sering dilakukan penjemputan warga belajar dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh penyelenggara, para tutor dan juga Ketua RT setempat.

Dalam pelaksanaan rencana strategik yang disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo ini masih terdapat beberapa kendala seperti yang telah disebutkan diatas. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi agar kedepannya program pemerintah dalam hal Pemberantasan Buta Aksara ini dapat berjalan lebih baik.

Pentingnya dilakukan evaluasi pada pelaksanaan suatu program yaitu :

1. Dengan dilakukannya evaluasi program, maka akan dapat memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan program yang telah dilaksanakan tersebut.
2. Evaluasi program menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan.
3. Evaluasi dapat menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan.
4. Evaluasi yang dilakukan akan memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Dengan adanya evaluasi program, membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pembangunan. (<http://www.yakita.com>. 02 November 2008)

Dalam Djudju Sudjana (2006 : 48), dijelaskan bahwa tujuan umum evaluasi program adalah menyediakan atau menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program tersebut. Tujuan khusus evaluasi adalah :

1. memberi masukan bagi perencanaan program,
2. menyajikan masukan bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program,
3. memberi masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program,
4. memberi masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat program,
5. memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program,
6. menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program.

Tujuan dilakukannya evaluasi yaitu untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran, manfaat, dan dampak dari pelaksanaan program yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya. (<http://www.yakita.com>.02 November 2008)

Dengan dilaksanakannya evaluasi pada suatu program, maka akan diketahui dampak dari pelaksanaan program sehingga pada perencanaan program yang akan datang menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Untuk itulah disini penulis tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo supaya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kecamatan Sukoharjo.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimanakah hasil evaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendorong serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan mata kuliah di Jurusan Administrasi Negara, khususnya mengenai evaluasi pelaksanaan suatu program.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut :

- 1) Dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo. Dapat memberikan gambaran sejauh mana program Pemberantasan Buta Aksara diterapkan

untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

- 2) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang terkait dalam masalah Pemberantasan Buta Aksara.
- 3) Sebagai bahan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan Pemberantasan Buta Aksara.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **b. Evaluasi**

Istilah evaluasi menurut Djudju Sudjana mempunyai pengertian bahwa :

“Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan/ atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan”. (Djudju Sudjana, 2006 : 7)

Pengertian evaluasi yang dijelaskan oleh Cronbach, Alkin, dan Stufflebeam dalam Djudju Sudjana (2006 : 19) bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan.

Popham, Provus, dan Rivlin dalam Djudju Sudjana (2006 : 19) menjelaskan pengertian evaluasi yaitu kegiatan membandingkan data tentang penampilan orang-orang dengan standart yang telah diterima umum.

Ralph Tayler dalam Djudju Sudjana (2006 : 19) mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai, dan upaya

mendokumentasikan kecocokan antara hasil belajar peserta didik dengan tujuan program. Malcolm dan Provus, sebagai pencetus gagasan *Discrepancy Evaluation*, menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui perbedaan antara apa yang ada dengan dengan suatu standart yang telah ditetapkan serta bagaimana menyatakan perbedaan antara keduanya.

Menurut Scriven dan Glass dalam Djudju Sudjana (2006 : 19) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui manfaat atau kegunaan suatu program, kegiatan, dan sebagainya.

Pengertian evaluasi menurut Eisner dalam Djudju Sudjana (2006 : 19) adalah memutuskan suatu program secara kritis dengan menggunakan jasa keahlian.

Parlett dan Hamilton dalam Djudju Sudjana (2006 : 19) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan menggambarkan dan menginterpretasi konteks yang lebih luas dimana program berfungsi.

Komite untuk standart, yang terdiri atas 17 anggota yang mewakili 12 organisasi yang tertulis dalam Djudju Sudjana (2006 : 19) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang sistematis atau teratur tentang manfaat atau kegunaan beberapa objek yang dievaluasi (Joint Committee, 1981).

Menurut Suchman, beliau mengemukakan tentang pengertian evaluasi bahwa :

“Evaluasi yaitu penentuan (apakah berdasarkan opini, catatan, data subjektif dan objektif) hasil (apakah baik atau tidak baik, sementara atau permanen, segera atau ditunda) yang diperoleh dengan beberapa kegiatan (suatu program, sebagian dari program dan sebagainya) yang dibuat untuk memperoleh suatu tujuan mengenai nilai atau *performance*”. (Moh. Nazir, 1998 : 108).

Tujuan dikembangkannya evaluasi menurut Pariata Westra (1983 : 41) adalah bagaimana menyediakan informasi yang siap tentang program-program pembangunan agar dapat mencapai sasaran utama yang dituju dan dapat mengendalikan sasaran itu secara prosedural sesuai dengan



rencana dan program, sehingga dengan diadakannya evaluasi diharapkan agar penentu kebijakan atau perencana memperoleh informasi tentang pelaksanaan program dan hasilnya, yang dapat membantu mereka dalam pembuatan keputusan termasuk apakah perlu menambah, mengurangi, atau bahkan mengubah program yang ada.

Kegunaan evaluasi menurut Pariata Westra (1983 : 46) ialah menyiapkan jawaban atas pertanyaan seberapa jauh dampak pembangunan terhadap masyarakat setempat atau masyarakat yang sedang dibangun.

Jurnal Internasional yang dikemukakan oleh Thomson Reuters tentang pengertian evaluasi sebagai berikut :

*“Evaluation is interdisciplinary, bringing together contributions from across the social sciences and related disciplines, including, but not limited to:*

- *politics, economics and public administration*
- *psychology, sociology and anthropology*
- *education, health and law*
- *information science and information technology”*

*Program evaluation is a systematic method for collecting, analyzing, and using information to answer basic questions about project, policies, and programs”.*

“Evaluasi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membawa kontribusi bersama dari lintas ilmu sosial dan berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain yang tidak terbatas pada :

- Ilmu politik, ilmu Ekonomi, dan ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Psikologi, ilmu Kesehatan dan juga ilmu Hukum
- Ilmu Informasi dan Teknologi Informasi/TI.

Evaluasi Program adalah sebuah metode sistematis yang berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan mendasar tentang beberapa proyek, kebijakan, dan program”. (Evaluation : The International Journal of Theory, Research and Practice, p. 98, Vol. 14. Thomson Reuters 2007, Tavistock Institute, London, UK)

Dalam Jurnal Internasional yang dikemukakan oleh Gene Shackman, menyatakan pengertian Evaluasi adalah sebagai berikut:

*“Evaluation is a systematic assessment. Evaluations should follow a systematic and mutually agreed on plan. Plans will typically include the following:*

- *Determining the goal of the evaluation: What is the evaluation question, what is the evaluation to find out.*
- *How will the evaluation answer the question: What methods will be used.*
- *Making the results useful, how will the results be reported so that they can be used by the organization to make improvements”.*

“Evaluasi adalah suatu penaksiran yang dilakukan secara rutin/sistematis. Evaluasi harus mengikuti perencanaan yang sistematis dan telah disepakati. Perencanaan berisi tentang :

- Penentuan tujuan evaluasi : apakah masalah-masalah yang ada dalam proses evaluasi, apakah yang diperoleh dari evaluasi.
- Bagaimana evaluasi dapat menyelesaikan masalah-masalah : apa metode yang akan digunakan.
- Membuat hasil yang berguna, bagaimana melaporkan hasil evaluasi sehingga hasil tersebut dapat digunakan oleh organisasi sebagai sarana peningkatan kualitas”. (What is Program Evaluation p. 101. Vol. 11, Gene Shackman, 2007, Washington DC)

### c. Pelaksanaan atau Implementasi

J. Salusu (1988 : 409) mengemukakan tentang pengertian Implementasi bahwa :

Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.( J. Salusu 1988 : 409)

Menurut Higgins dalam J. Salusu (1988 : 410), implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya Sumber Daya Manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi.

Dalam bukunya, J. Salusu (1988 : 411) menyebutkan bahwa implementasi adalah satu proses yang terarah dan terorganisasi, melibatkan banyak sumber daya.

#### d. Program

Dalam Djudju Sudjana (2006 : 4) Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang disusun secara terencana dan memiliki tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, pelaksana kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat-alat biaya, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Secara lebih luas, program yaitu kegiatan yang memiliki komponen, proses dan tujuan program.

Tertulis dalam Djudju Sudjana (2006 : 313) bahwa pengertian program adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan, lembaga, institusi dengan dukungan sarana dan prasarana yang diorganisasi dan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Dalam Pariata Westra menyatakan tentang pengertian Program, bahwa :

“Program merupakan keseluruhan langkah atau kegiatan yang saling bergantung yang menuju ke arah pencapaian suatu tujuan yang telah disebutkan. Dapat dikatakan pula bahwa program adalah tujuan akhir dan disusun atau dikembangkan menjadi anggaran dalam rangka semua unsur yang perlu bagi pelaksanaannya. Dengan demikian, istilah program lalu berarti tujuan akhir dari banyak kegiatan yang saling bergantung (*The Ultimate of many Interdependent Activities*)”. (Pariata Westra, 1983 : 31)

Dikemukakan pula definisi yang berbeda tentang pengertian program dalam Pariata Westra (1983 : 41), bahwa program berarti seperangkat aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan dan maksud dari suatu rencana pembangunan, yang spesifik.

#### 4. Evaluasi Program

Dalam Djudju Sudjana (2006 : 17-18), dijelaskan bahwa evaluasi program bukanlah kegiatan untuk menetapkan baik buruknya suatu program karena kegiatan tersebut termasuk pada keputusan (*judgement*). Evaluasi program bukan kegiatan untuk mengukur karakteristik unsur-unsur program, seperti komponen, proses, dan hasil program, sebab kegiatan itu lebih

tepat apabila dikategorikan kedalam pengukuran (*measurement*). Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa evaluasi program bukan kegiatan untuk mencari kesalahan orang lain atau lembaga, mengetes dan mengukur, atau memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan program.

Beberapa pakar psikologi dan pakar pendidikan mengemukakan bahwa istilah evaluasi program mempunyai arti lebih luas dari pengertian yang dikemukakan diatas. Wilbur Harris dalam "*The Nature and Functions of Educational Evaluation*", yang dikutip Steel, menjelaskan bahwa "*Evaluation is the systematic process of judging the worth, desirability, effectiveness, or adequacy of something according to definitive criteria and purposes. The judgement is based upon a careful comparison of observation data with criteria standards*". Pengertian ini menjelaskan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas, atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standart tertentu yang telah dibakukan.

Worthen dan Sanders dalam Djudju Sudjana (2006 : 20) memberi arti bahwa "*Evaluation as a process of identifying and collecting information to assist decision-makers in choosing among available decision alternatives*". Dalam pengertian tersebut dikemukakan bahwa evaluasi program adalah suatu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih berbagai alternatif keputusan. Pakar lain yaitu Alkin, mengemukakan bahwa "*Evaluation is the process of accertaining the decision areas of concern, selecting appropriate information in order to report summary data useful to decision makers in selecting among alternatives*". Menurut Alkin, evaluasi program merupakan proses yang berkaitan dengan penyiapan berbagai wilayah keputusan melalui pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan, dan analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para

pengambil keputusan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan untuk menetapkan keputusan.

Stufflebeam mengemukakan rumusan evaluasi pendidikan sebagai berikut, *“Educational evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”*. Menurut rumusan ini, evaluasi program pendidikan merupakan proses mendiskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif keputusan.

Pendapat Mugiadi terhadap pengertian evaluasi program yang terdapat dalam Djudju Sudjana (2006 : 21) bahwa evaluasi program adalah upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan, atau proyek. Informasi tersebut berguna bagi pengambilan keputusan, antara lain untuk memperbaiki program, menyempurnakan kegiatan program lanjutan, menghentikan suatu kegiatan, atau menyebarluaskan gagasan yang mendasari suatu program atau kegiatan. Informasi yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan ilmiah, praktis, tepat guna, dan sesuai dengan nilai yang mendasari dalam setiap pengambilan keputusan.

Syamsu Mappa mendefinisikan evaluasi program sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan suatu program. Sedangkan Stake menggambarkan bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk merespon suatu program yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Paulson dalam bukunya *“A Strategy for Evaluation Design”*, yang dikutip oleh Grotelueschen (1976 : 17), mengemukakan bahwa *“Evaluation as a process of examining certain objects or events in the light of specific value standart for the purpose of making adaptive decisions”*. Menurut Paulson evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk

menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini maka evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan berbagai pengertian sebagaimana dikemukakan diatas, maka evaluasi program dapat didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Dalam Djudju Sudjana (2006 : 51) disebutkan pengelompokan model-model evaluasi program, terdiri dari enam kategori yaitu :

#### 1. Evaluasi Terfokus pada Pengambilan Keputusan

Evaluasi ini diarahkan untuk menghimpun, mengolah, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Model evaluasi ini digunakan berkaitan dengan upaya :

- a. Menentukan tipe keputusan yang akan diambil.
- b. Mengidentifikasi urutan program yang akan dievaluasi.
- c. Menyusun pertanyaan dan jawaban.
- d. Menentukan kriteria keberhasilan.

Jenis-jenis model evaluasi program yang termasuk ke dalam kategori ini adalah :

- 1) Evaluasi program yang terpusat untuk pengambilan keputusan (*Stufflebeam; Phi Delta Kappa*). Model evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi empat unsur program yaitu konteks, masukan, proses, dan hasil (*Contex, Input, Process, and Product* atau CIPP) yang berkaitan dengan empat macam keputusan tentang perencanaan, struktur pelaksanaan, dan pendauran program.
- 2) Evaluasi perbedaan tahapan program (*Tripodi, Fellin, dan Epstein*). Contohnya,

mengidentifikasi kriteria yang perlu digunakan dalam menyusun tiga tahapan program yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

- 3) Evaluasi kesenjangan program (*Provus*). Contohnya, mengidentifikasi standart proses pelaksanaan dan hasil suatu program, serta menggambarkan kesenjangan dalam pelaksanaan program dengan membandingkan kenyataan yang ada sekarang dengan standart yang telah ditentukan sebelumnya.
  - 4) Evaluasi tentang prioritas program (*Boyle*). Contohnya, menggambarkan kriteria yang dianggap penting dalam menentukan alternatif prioritas kebutuhan dan prioritas program.
  - 5) Evaluasi perkembangan (*Lindvall dan Cox; Lamrock, Smith, dan Waren*). Contohnya, menggambarkan proses yang digunakan untuk mengembangkan prototipe program yang akan diterapkan dalam berbagai waktu dan situasi tertentu di masa yang akan datang.
  - 6) Evaluasi sarana dan prasarana (*Glass; Crane dan Abt*). Contohnya, evaluasi tentang pedoman untuk memilih fasilitas dan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan program.
  - 7) Evaluasi reaksi warga belajar. Contohnya, menyediakan suatu ringkasan penjelasan mengenai hasil tanggapan yang dihimpun dari warga belajar program pembelajaran.
2. Evaluasi Unsur-unsur Program

Penggunaan evaluasi program ini antara lain untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program terhadap keputusan kebijakan publik, sistem manajemen, dan pendekatan kelembagaan yang menekankan pendekatan kemanusiaan.

Jenis-jenis model evaluasi program yang termasuk kategori ini adalah :

- a. Model evaluasi pelaksanaan dan pengaruh program

(*Freeman and Sheerwood*). Contohnya, evaluasi untuk mengidentifikasi pelaksanaan suatu program yang sistemik, sebagai implementasi kebijakan sosial (*social policy*), dan pengaruhnya bagi masyarakat.

- b. Model komponen aktual (*Knox, Mezirow and Darkenwaid*). Contohnya menggambarkan suatu sistem dengan menganalisis suatu program.
  - c. Sistem pengelolaan program melalui *Program Evaluation and Review Technique* (PERT), organisasi sebagai sistem yang menyeluruh (*Young*), Model Sistem Makro (*Alkin*), Model Sistem dalam Penyusunan Tujuan (*Van Gigch and Hill*), sistem kontak dalam program (*Duft*), Sistem manajemen Informasi (SEMIS), Evaluasi Program Pengambilan Keputusan (*Hesseling*).
  - d. Sistem Sosial Organisasi melalui Model Sistem Sosial (*Loomia*), Model-model Organisasi (*Etzioni, Schulberg, and Baker*), dan model motivasi (*Lewis*). Contohnya, mengevaluasi berbagai model sosial organisasi dengan menitikberatkan pada unsur manusianya.
3. Evaluasi Jenis dan Tipe Kegiatan

Model ini mencakup jenis-jenis data dan tipe-tipe kegiatan yang digunakan dalam evaluasi program, serta meliputi :

- a. Model Kelayakan Evaluasi (*Stake*). Contohnya, mengidentifikasi tiga kategori data utama dalam program pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) dan empat jenis data (konteks, masukan, proses, dan produk) yang dapat digunakan dalam menyusun kesimpulan hasil evaluasi untuk digunakan lebih lanjut.
- b. Model Peranan Sistem (*Knox*). Contohnya, mengategorikan data yang akan digunakan



dalam mengevaluasi unsur-unsur program sistematis.

- c. Model Hirarki antara Proses dan Tujuan (*Bennett*). Contohnya, menjelaskan berbagai jenis data untuk menilai tingkatan hubungan timbal balik antara proses dan hasil program.
- d. Model Kontinuitas Kerja Mandiri (*Alexander*). Contohnya, menyusun sistematika langkah pengumpulan jenis-jenis data yang dilakukan oleh penyelenggara program dan untuk mengidentifikasi saat keterlibatan ahli dalam penyusunan program.

#### 4. Evaluasi Pelaksanaan Program

Fokus model-model yang termasuk dalam kategori ini adalah evaluasi terhadap berbagai proses pelaksanaan program. Sebagian model berhubungan dengan proses evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan program.

Enam model yang termasuk ke dalam kategori ini adalah sebagai berikut :

- a. Model Appraisal (*Haris*). Contohnya, model ini menitikberatkan pada peranan keputusan yang disusun oleh tenaga profesional.
- b. Pengelolaan Data (*Phi Delta Kappa*). Contohnya, penyajian pedoman untuk mengkuantifikasi data.
- c. Model Proses secara Alamiah (*Steele*). Contohnya, menjelaskan bagaimana model appraisal dan data kuantitatif dapat digabungkan dengan proses pengambilan keputusan.
- d. Evaluasi Monitoring (*Bruce*). Contohnya, upaya yang menunjukkan cara penggunaan evaluasi selama pelaksanaan itu sesuai dengan rencana.
- e. Evaluasi Perkembangan (*Kreitlow*). Contohnya,

penggunaan appraisal untuk menstimulasi perkembangan program.

- f. Evaluasi Transaksi (*Rappey*). Contohnya, evaluasi yang menekankan pada hubungan kemanusiaan bagi mereka yang terlibat dalam proses evaluasi untuk membantu perubahan.

## 5. Evaluasi Pencapaian Tujuan Khusus Program

Kegunaan model evaluasi ini adalah :

- a. Dengan menggunakan tujuan-tujuan khusus program sebagai titik berat pencapaian hasil maka keseluruhan kegiatan evaluasi program akan lebih efisien.
- b. Penekanan pencapaian tujuan khusus akan membantu pengelola program meningkatkan kecakapan dalam mengidentifikasi tentang tujuan-tujuan mana yang masuk akal pada situasi perencanaan program dan dalam mengembangkan kecakapan dalam menggunakan tujuan-tujuan khusus sebagai langkah penting dalam perencanaan program.

Model-model dalam evaluasi ini terdiri dari :

- 1) Model Tylerian yang mencakup Model Tyler (*Tyler*), Program Asesmen Nasional, Model Empat Pertanyaan (*Gottman dan Clasen*) dan Adopsi Model Tyler dalam pendidikan orang dewasa.
- 2) Model Evaluasi Pembelajaran, mencakup : acuan tujuan pembelajaran (*Popham dan Baker*), dan evaluasi fasilitasi pembelajaran (*Bloom, Hastings, dan Madaus*).
- 3) Model Tujuan Khusus Program, mencakup : model kriteria keberhasilan (*Sachman*), model tujuan khusus-kegiatan-dan sumber atau O-A-R (*Objective, Activity, and Reserch*) Model (*Deniston, dkk*), kriteria dan tujuan khusus

(*Mateson*), evaluasi lokal terarah (*Byram dan Robertson*), model Ohio (*Starr, dkk*), sistem perencanaan program dan pembiayaan (PPBS), model variabel sistem, seperti model asosiasi pendidikan nasional atau model NEA (*Taba dan Sawin*), model-model kubus (*Hammond dan Armstrong, dkk*), domain informasi (*Nelson*); dan tipe-tipe evaluasi (*Wholey, dkk*).

- 4) Kategori dan Kriteria Tujuan Khusus, terdiri atas : tujuan khusus sebagai sistem dan bagian sistem, tingkatan dan tahapan waktu pencapaian tujuan khusus, jenis-jenis tujuan khusus, dan karakteristik tujuan-tujuan khusus.

#### 6. Evaluasi Hasil dan Pengaruh Program

Model ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- C. Evaluasi Bebas terhadap Tujuan (*Scriven*). Contohnya, membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dinyatakan, sebagai tolok ukur dalam upaya menentukan efektivitas program.
- D. Wilayah Hasil Program (*Lamroch, Smith, dan Waren*). Misalnya, mengidentifikasi tiga sumber informasi tentang hasil dan alat pengumpulan data yang dapat digunakan dalam menentukan efektivitas program.
- E. Model Perubahan Berganda (*Hayes Jr*). Contohnya, mengidentifikasi berbagai cara untuk mengetahui efektivitas perubahan.
- F. Dimensi Efektivitas Program (*Steele*). Contohnya, mengklasifikasi jenis-jenis hasil program yang diharapkan dapat dicapai dalam program pembangunan masyarakat dan dalam mendata sumber-sumber informasinya.
- G. Efektivitas Metode (*Wilson dan Gallup*). Misalnya, menyajikan berbagai contoh penggunaan data hasil program untuk menguji kesahihan metode-metode penyusunan

program.

- H. Evaluasi Pengaruh Program (*Borus dan Tash*). Contohnya, menyajikan pengaruh program secara berlanjut dalam jangka panjang.
- I. Kebijakan Umum (*Berlak*). Contohnya, menyajikan kerangka untuk melihat hubungan antara penyusunan program dengan kebijakan umum.
- J. Evaluasi Institusional (*Forehand*). Contohnya, menyediakan kerangka acuan evaluasi.
- K. Indikator-indikator Sosial (*Paulson*). Contohnya, menggunakan indikator-indikator sosial sebagai alat untuk mengukur kemajuan masyarakat.
- L. Model-model Riset (*Weis, Longest, Cain, dan Hollister*). Contohnya, meninjau kembali model-model tradisional yang digunakan dalam evaluasi hasil.
- M. Pengujian Efisiensi. Contohnya, mengidentifikasi peranan *cost-benefit analysis* yang berkaitan dengan hasil-hasil program.
- N. Akuntabilitas (*Accountability*). Contohnya, menyajikan konsep pemanduan dan identifikasi aktivitas yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya.
- O. Model Pembiayaan Perubahan (*Bramley*). Contohnya, biaya perubahan, analisis efektivitas biaya, dan analisis keuntungan pembiayaan.

Dari berbagai model evaluasi tersebut, penulis memilih model evaluasi CIPP ini sebagai model dalam penelitian karena model evaluasi ini diarahkan untuk menghimpun, mengolah, serta menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan guna memperbaiki dan mengembangkan program dengan menggunakan empat (4) sasaran penilaian yaitu konteks, masukan, proses, dan produk. Dengan 4 sasaran penilaian tersebut dapat mempermudah penulis dalam mengetahui pelaksanaan suatu program, serta sangat membantu untuk memperbaiki dan mengembangkan program.

Dalam Djudju Sudjana (2006 : 54-57) dijelaskan bahwa evaluasi konteks (*Contex*) program menyajikan data tentang alasan-alasan untuk menetapkan tujuan-tujuan program dan prioritas tujuan. Evaluasi ini menjelaskan mengenai kondisi lingkungan yang relevan, menggambarkan kondisi yang ada dan diinginkan, dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lingkungan. Dalam evaluasi masukan (*Input*), menyediakan data untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Hal ini berkaitan dengan relevansi, kepraktisan, pembiayaan (dana), efektifitas yang dikehendaki, dan alternatif-alternatif yang dianggap unggul. Evaluasi proses (*Proccess*) ini menyediakan umpan balik yang berkenaan dengan efisiensi pelaksanaan program, termasuk didalamnya pengaruh sistem dan keterlaksanaannya. Evaluasi ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan (hambatan) dalam rancangan prosedur kegiatan dan program pelaksanaannya. Evaluasi produk (*Product*) mengukur dan menginterpretasikan pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program.

Penulis menyederhanakan model evaluasi CIPP tersebut sebagai berikut : Model evaluasi CIPP ini mengidentifikasikan 4 tipe evaluasi program yang berkaitan dengan a) Evaluasi Konteks (*Contex*) program yang meliputi evaluasi tujuan dari pelaksanaan program dan sasaran pelaksanaan program, b) Evaluasi Masukan (*Input*) meliputi evaluasi kondisi kelompok sasaran, latar belakang pelaksana program, sarana dan prasarana program, dana pelaksanaan program, c) Evaluasi Proses (*Process*) terdiri dari evaluasi tentang pelaksanaan dan hambatan program, d) Evaluasi Produk (*Product*) mengevaluasi tentang dampak pelaksanaan program.

#### 1. **Program Pemberantasan Buta Aksara**

Program Pemberantasan Buta Aksara merupakan bentuk pelayanan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca, menghitung, dan menganalisis tematik yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya.

Buta aksara adalah seseorang yang tidak dapat membaca, menulis, dalam huruf latin dan berhitung dengan angka Arab, sedangkan buta aksara fungsional adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan kemampuan baca, tulis, dan berhitung dalam kehidupan sehari-hari (Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, 2006: 3).

Pengertian buta aksara adalah mereka yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. (<http://www.SuaraMerdeka.com> 03 Agustus 2008).

Tujuan program Pemberantasan Buta Aksara ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan membaca, menulis, berhitung, dan tematik serta keterampilan fungsional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.
- b. Menggali potensi dan sumber-sumber kehidupan yang ada di lingkungan sekitar warga belajar untuk memecahkan masalah keaksaraannya.
- c. Memberi bekal keterampilan kepada warga belajar agar dapat mandiri.

Visi program Pemberantasan Buta Aksara (PBA) adalah meningkatkan keaksaraan dasar warga masyarakat buta aksara sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya.

Di dalam program Pemberantasan Buta Aksara (PBA) terdapat empat prinsip utama

yang perlu dipahami yaitu :

- a. Konteks lokal : Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan minat, kebutuhan pengalaman dan budaya lokal serta potensi yang ada di sekitar warga belajar.
- b. Desain lokal : Tutor bersama warga belajar perlu merancang kegiatan pembelajaran di kelompok belajar sebagai jawaban atas hal-hal tersebut di atas.
- c. Partisipatif : Tutor perlu melibatkan warga belajar berpartisipasi secara aktif dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
- d. Pemanfaatan hasil pembelajaran : dari hasil pembelajarannya, warga belajar diharapkan dapat memecahkan masalah keaksaraannya dan meningkatkan mutu serta taraf hidupnya (Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, 2006 : 31).

## **6. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara.**

Setelah mengetahui beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari evaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara dapat dicapai, apakah pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan apakah dampak yang akan terjadi setelah program Pemberantasan Buta Aksara ini dilaksanakan.

## **F. Kerangka Pikir**

Dari 14 Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo, ada 8 Kelurahan yang didalamnya terdapat 394 penduduk yang masih menyandang status buta aksara. Dengan berpedoman pada upaya Direktorat Pendidikan masyarakat untuk meningkatkan tingkat keaksaraan di Indonesia dan upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk

memperoleh pendidikan dan pengajaran, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kecamatan Sukoharjo yang mempunyai wewenang untuk mengurus bidang pendidikan di tingkat Kecamatan ini juga berupaya menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Mengingat lebih dari 50 % Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo masih terdapat penduduk yang menyandang buta aksara.

Melalui program Pemberantasan Buta Aksara yang terdiri dari 3 tahapan yaitu : tahap pemberantasan, tahap pembinaan, dan tahap pelestarian ini maka masyarakat tidak hanya diberi materi membaca, menulis, berhitung serata analisis tematik namun juga diberi materi yang bersifat fungsional yaitu materi yang berhubungan dengan keterampilan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang masih terdapat berbagai kendala ini, maka perlu adanya evaluasi agar kedepannya pelaksanaan program pemerintah ini dapat berjalan lebih baik. Dalam mengevaluasi program Pemberantasan Buta Aksara ini, Penulis menggunakan model CIPP, yaitu : Evaluasi Konteks (*Context*), Evaluasi Masukan (*Input*), Evaluasi Proses (*Process*), dan Evaluasi Produk (*Product*).

Dengan dilaksanakannya program Pemberantasan Buta Aksara maka dampak sosial yang diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu berinisiatif dan memiliki kemandirian dalam kehidupannya sehingga tidak menggantungkan diri pada orang dan berpikiran untuk maju. Selain itu juga diharapkan masyarakat sudah memiliki kemampuan keaksaraan sehingga mampu melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keaksaraan dan mampu mengakses informasi dalam bentuk tulisan seperti koran dan majalah. Setelah pelaksanaan program



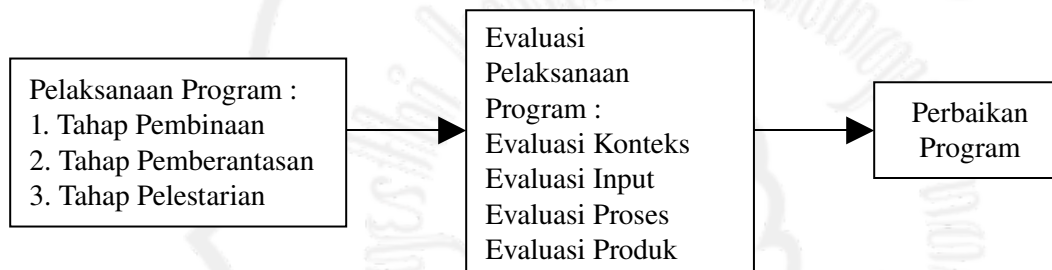
Pemberantasan Buta Aksara ini, dampak ekonomi yang diharapkan pemerintah bagi masyarakatnya adalah masyarakat mampu berwirausaha secara mandiri dengan bekal keterampilan yang telah diberikan selama program pemerintah ini berlangsung. Dengan begitu, apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat tercapai.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program maka diharapkan hasil dari evaluasi tersebut dapat berguna untuk perbaikan program itu sendiri kedepannya.

Kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

#### Bagan Kerangka Pikir Penelitian



### G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menegaskan konsep atau batasan yang digunakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Adapun definisi konseptual dalam Penelitian ini adalah :

#### 1. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program merupakan upaya untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran, manfaat, dan dampak dari pelaksanaan program yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya. Dengan dilaksanakannya

evaluasi pada suatu program, maka akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak dari pelaksanaan program sehingga pada perencanaan program yang akan datang dapat berjalan lebih baik.

## 2. Program Pemberantasan Buta Aksara

Program Pemberantasan Buta Aksara merupakan bentuk pelayanan pendidikan luar sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca, menghitung, dan menganalisis tematik yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya.

Program ini meliputi 3 tahap yaitu :

- a. Tahap Pemberantasan
- b. Tahap Pembinaan
- c. Tahap Pelestarian

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam program Pemberantasan Buta Aksara adalah :

- a. Langkah persiapan
- b. Langkah pelaksanaan
- c. Langkah evaluasi dan monitoring
- d. Langkah pelaporan dan tindak lanjut

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan perubahan konsep-konsep yang berupa kontrak ke dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji.

Evaluasi program Pemberantasan Buta Aksara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu

meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya ini, menggunakan model CIPP (*Contex, Input, Process, and Product*). Hal-hal yang akan dievaluasi oleh Penulis sebagai berikut :

1. Evaluasi Konteks (*Contex*)

Hal-hal yang akan Penulis evaluasi berkaitan dengan konteks :

j. Tujuan pelaksanaan

k. Sasaran

xii. Evaluasi Masukan (*Input*)

Hal-hal yang akan Penulis evaluasi berkaitan dengan input :

a. Kondisi kelompok sasaran

b. Latar belakang pendidikan pelaksana program (tutor)

c. Sarana dan prasarana pelaksanaan program

d. Dana bagi pelaksanaan program

3. Evaluasi Proses (*Process*)

Hal-hal yang akan Penulis evaluasi berkaitan dengan Proses :

a. Pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara

b. Hambatan dalam pelaksanaan program

6. Evaluasi Produk (*Product*)

Hal yang akan Penulis evaluasi berkaitan dengan Produk :

a. Dampak pelaksanaan Program

I. **Metodologi Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan

tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara kemudian mengevaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo. Pada penelitian ini penulis berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun data. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif yaitu terutama berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi (H. B. Sutopo, 2002 : 35). Penelitian ini menitikberatkan pada *field research* atau penelitian lapangan, namun juga tidak mengesampingkan pada studi kepustakaan atau *library research* terutama dalam menyusun landasan teori.

## 2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah :

- a. Dengan mengetahui bahwa di Kecamatan Sukoharjo masih terdapat masyarakat yang menyandang status buta aksara, yaitu sejumlah 394 orang yang tersebar di delapan Kelurahan sedangkan di Kecamatan Sukoharjo sendiri terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan yang bertugas mengurus pendidikan di tingkat kecamatan yang sedang menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara. Maka penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimana pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara tersebut.
- b. Penulis melihat bahwa begitu berat tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dalam mengurangi tingkat buta aksara di kalangan masyarakat. Maka penulis

ingin mengetahui dan mengevaluasi apakah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan di Kecamatan Sukoharjo ini benar-benar menjalankan tugasnya yaitu menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara guna meningkatkan tingkat keaksaraan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo.

c. Memungkinkan penulis mendapatkan data-data yang diperlukan.

### 3. **Teknik Cuplikan**

Teknik cuplikan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering juga dinyatakan sebagai internal sampling. dalam cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil untuk mewakili informasinya, dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak sangat perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar dari pada informasi yang diperoleh dari jumlah narasumber yang lebih banyak, yang mungkin kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya (H.B. Sutopo 2002 : 55).

### 4. **Jenis Data**

Data dan informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. **Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan obyek penelitian melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah sendiri oleh Penulis. Data primer diperoleh dari sumber pertama baik dari individu

seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.
- 2) Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo sebagai pelaksana teknis dan yang bertanggung jawab melaksanakan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo.
- 3) Penyelenggara dan Tutor program Pemberantasan Buta Aksara Kecamatan Sukoharjo.
- 4) Masyarakat yang sedang atau pernah memperoleh pendidikan program Pemberantasan Buta Aksara.

Selain sumber-sumber tersebut juga dapat berupa pengamatan langsung pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo.

b. Data skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui buku-buku, kepustakaan, dokumentasi, dan keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung (tatap muka) antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth*

*interviewing*), yaitu wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasi secara lebih jauh dan mendalam. Dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden (H. B. Sutopo, 2002 : 59). Wawancara ini dilakukan dalam waktu dan kondisi-kondisi yang paling tepat guna mendapatkan kejelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti (M. Hariwijaya dan Triton 2008 : 63). Dalam penelitian ini Penulis mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang diselidiki/ dijumpai secara sistematis. Terutama saat pelaksanaan proses pembelajaran dalam program Pemberantasan Buta Aksara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi Penelitian serta pengumpulan data berdasarkan catatan yang berupa dokumen/ arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo.

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles

dan Huberman dalam H. B. Sutopo (2002 : 94-96), ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *fieldnote*.

Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir Penelitian selesai disusun.

b. Sajian Data (*Data Display*)`

Merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, Penulis akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan Penulis untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penarikan Simpulan (*Conclusion Drawing*)

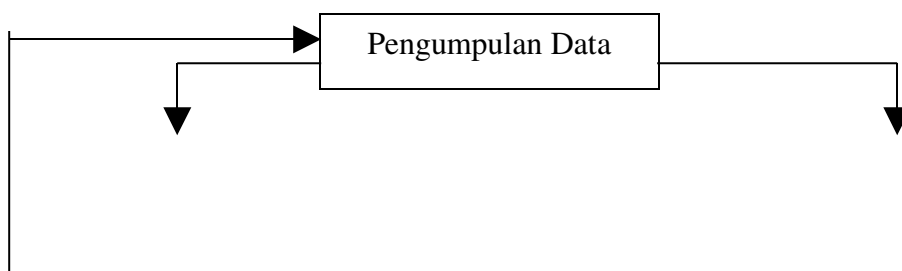
Dalam awal pengumpulan data Penulis sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga memudahkan dalam pengambilan data kesimpulan.

Dalam proses analisisnya, ketiga komponen tersebut akan beraktivitas secara interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam penelitian ini, Penulis tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data dan pengambilan simpulan dengan menggunakan waktu yang ada.

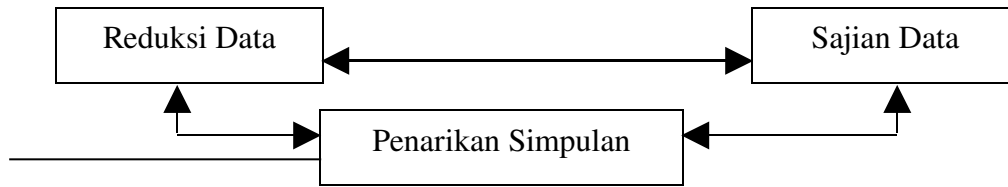
Proses analisis data dengan menggunakan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2

Skema Model Analisis Interaktif







(Sumber : Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman, dalam H. B. Sutopo, 2002 : 96)

## 7. Validitas Data

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang disebut dengan validitas data. Validitas data akan membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik triangulasi data. Yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan terhadap data yang diperoleh dari seorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data. (H. B Sutopo, 2002 : 77)

## BAB II

### DESKRIPSI LOKASI

#### A. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

##### 1. **Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo**

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo adalah :“Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang kokoh dalam IMTAQ (Iman dan Taqwa), Unggul dalam IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan Berdaya saing tinggi”.

Adapun unsur dimensi yang terkandung dalam Visi tersebut, yaitu : bahwa pendidikan di arahkan untuk dapat menghasilkan anak didik yang beriman, berilmu dan beramal, serta memiliki daya saing dalam menghadapi era globalisasi pada masa yang akan datang.

Prasyarat sumber daya manusia yang memiliki daya saing di era globalisasi, antara lain :

4. Kemampuan berkomunikasi secara global (bahasa internasional)
5. Kemampuan akses pada teknologi global
6. Kemampuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing di pasar global.

Sedangkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo didalam mewujudkan Visi di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

- b. Meningkatkan kerukunan yang dilandasi oleh budi pekerti luhur, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan
- c. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani
- d. Meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan melalui jalur pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi

## 2. **Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.**

Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang menjadi prioritas di bidang pendidikan antara lain :

- a. Meningkatkan mutu dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan
- b. Mengembangkan kesenian dan nilai budaya
- c. Pembinaan dan pengembangan generasi muda
- d. Mengembangkan pembinaan olahraga

Adapun sasaran pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan profesionalisme tenaga guru
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Meningkatkan prestasi siswa
- d. Membentuk iman dan taqwa serta berbudi luhur, dan sehat jasmani dan rohani
- e. Mengembangkan serta membina kesenian dan nilai-nilai budaya
- f. Meningkatkan pembinaan generasi muda dan karang taruna
- g. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan
- h. Penuntasan Wajib belajar Pendidikan dasar 9 Tahun

- i. Tersedianya data dan informasi pendidikan

### 3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan pada semua kegiatan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan yang menjadi perhatian utama adalah program kerja dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tugas pokok dan fungsi.

#### a. Kebijakan bidang pendidikan

Guna mewujudkan visi dan misi serta pencapaian tujuan maupun sasaran Dinas Pendidikan yang mempunyai tanggung jawab di bidang pendidikan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo telah menyusun 10 arah kebijakan umum di bidang pendidikan, antara lain :

- 1) Penuntasan Wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun
- 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
- 3) Peningkatan mutu pendidikan
- 4) Peningkatan dan pelestarian seni serta budaya daerah di 12 kecamatan
- 5) Peningkatan guru berkualifikasi dan berkompetensi
- 6) Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan
- 7) Ketersediaan data informasi pendidikan
- 8) Meningkatkan bantuan (subsidi) dan layanan pendidikan sehingga mengurangi angka anak droup out (DO)
- 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan
- 10) Peningkatan kualitas kesehatan murid melalui perbaikan gizi dan usaha kesehatan sekolah.

- b. Implementasi 10 arah kebijakan umum Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukoharjo

- 1) Penuntasan Wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun, antara lain :
  - a) Penyelenggaraan Kejar paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA
  - b) Penyelenggaraan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM)
  - c) Pembinaan Lembaga Pendidikan Kursus (LPK)
  - d) Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
  - e) Pemberian bantuan mesin jahit
  - f) Lomba penulisan sinopsis paket B dan paket C
  - g) Lomba tutor paket B dan paket C
  - h) Pengadaan buku modul paket B dan paket C
  - i) Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
- 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, antara lain :
  - a) Revitalisasi sarana dan prasarana TK, SD/MI dan SMP/SMU/SMK
  - b) Pengadaan buku Mulok Bahasa Inggris kelas 4, 5 dan 6 bagi siswa SD
  - c) Pengadaan buku budi pekerti kelas 1 SD/MI
  - d) Operasional dan perawatan fasilitas SMP, SMU dan SMK
  - e) Pengadaan buku wajib untuk SD, SMP dan SMA/SMK
  - f) Pengadaan komputer dan printer
  - g) Pengadaan sarana dan prasarana kantor
  - h) Pengadaan kendaraan dinas
  - i) Pengadaan sarana olahraga dan kesenian
- 3) Peningkatan mutu pendidikan, antara lain :

- a) Pembelajaran IPA pola seqip
  - b) Penyelenggaraan lomba mata pelajaran bagi siswa
  - c) Lomba gugus SD binaan seqip dan SD reguler
  - d) Tetirah ke SPA Tawangmangu
  - e) Lomba siswa berprestasi
  - f) Lomba cerdas cermat SD/MI
  - g) Penyelenggaraan olimpiade MIPA
  - h) Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
  - i) Akreditasi sekolah
  - j) Pelaksanaan program akselerasi
  - k) Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan seni Islami
  - l) Pelaksanaan ujian semester 1 dan 2
- 4) Peningkatan dan pelestarian seni serta budaya daerah, antara lain :
- a) Penyelenggaraan lomba paduan suara.
  - b) Pelaksanaan pekan seni siswa.
  - c) Penulisan naskah cerita rakyat.
  - d) Pembinaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - e) Inventarisasi dan dokumentasi benda cagar budaya.
  - f) Pembinaan kesenian.
- 5) Peningkatan guru berkualifikasi dan berkompetensi serta kesejahteraan tenaga kependidikan, antara lain :
- a) Rintisan manajemen berbasis sekolah
  - b) Pelatihan petugas perpustakaan

- c) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
  - d) Kelebihan jam mengajar
  - e) Pembinaan guru penjaskes
  - f) Pelatihan guru Mulok Bahasa Inggris SD
  - g) Bintek karya ilmiah
  - h) Bintek mutu tenaga kependidikan
  - i) Bintek penilik dan tenaga lapangan Dikmas
  - j) PAK sanggar kegiatan belajar dan guru
  - k) BAP jabatan fungsional
  - l) Penyusunan konsep formasi guru
  - m) Tes guru berprestasi
- 6) Ketersediaan data informasi pendidikan, antara lain :
- a) Validitasi data pendidikan luar sekolah.
  - b) Penyusunan profil pendidikan.
- 7) Meningkatkan bantuan (subsidi) dan layanan pendidikan sehingga mengurangi angka anak Droup Out (DO), antara lain :
- a) Bantuan ujian akhir sekolah (UAS) bagi siswa SD.
  - b) Pelaksanaan penerimaan siswa baru.
  - c) Bantuan ujian akhir nasional (UAN) bagi siswa SMP, SMA dan SMK.
- 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, antara lain :
- a) Pembentukan dewan pendidikan
  - b) Pembentukan komite-komite sekolah
- 9) Peningkatan kualitas kesehatan murid melalui perbaikan gizi dan usaha kesehatan

sekolah, antara lain :

- a) Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- b) Program makanan tambahan anak sekolah

c. Program-Program Bidang Pendidikan

Program-program pembangunan bidang pendidikan yang di laksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6) Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- 7) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 8) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- 9) Program Pendidikan Menengah;
- 10) Program Pendidikan Non Formal;
- 11) Program Pendidikan Luar Biasa;
- 12) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 13) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 14) Program Pendidikan Kesiswaan;
- 15) Program Pendidikan Menengah Pertama;
- 16) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- 17) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;



- 18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 20) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.**

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang keberadaannya sebagai hasil produk dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan yang meliputi :

- a. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Prasekolah
- b. Pendidikan Menengah
- c. Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- d. Pendidikan Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pendidikan, Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, dan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok di bidang pendidikan dasar dan prasekolah meliputi, antara lain :

- a. Penghimpunan dan perumusan kebijakan/ pedoman/ petunjuk teknis pembinaan TK, SD dan SDLB, administrasi dan sarana TK, SD dan SDLB
- b. Penyusunan rencana/ program pembinaan TK, SD dan SDLB, administrasi TK, SD dan SDLB

- c. Penyusunan rencana kerja dan program pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas lembaga pendidikan TK, SD dan SDLB
- d. Pelaksanaan kurikulum TK (GBPKB), SD dan SDLB berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- e. Penyusunan kebutuhan buku pelajaran, buku laporan pendidikan, buku administrasi, blangko Danem, Danes dan STTB berdasarkan pedoman yang berlaku.
- f. Penyusunan dan penyebarluasan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru TK, SD dan SLDB.
- g. Fasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan TK, SD, dan SDLB.
- h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan manajemen TK, SD, dan SLDB berdasarkan pedoman yang berlaku.
- i. Evaluasi semester dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir SD dan SDLB berdasarkan pedoman yang berlaku.
- j. Perencanaan dan melaksanakan program Wajib belajar Pendidikan dasar (7–12 tahun) sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok di bidang pendidikan menengah meliputi, antara lain :

- a. Penghimpunan dan perumusan kebijakan/ pedoman/ petunjuk teknis pembinaan SLTP, SMU dan SMK serta , administrasi dan sarana SLTP, SMU dan SMK
- b. Penyusunan rencana/ program pembinaan SLTP, SMU dan SMK, serta administrasi SLTP, SMU dan SMK
- c. Penyusunan rencana kerja dan program pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas lembaga pendidikan SLTP, SMU dan SMK

- d. Penyusunan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan nasional SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- e. Penyusunan kebutuhan buku pelajaran, buku laporan pendidikan, buku administrasi, blangko Danem dan STTB berdasarkan pedoman yang berlaku
- f. Penyusunan dan penyebarluasan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru SLTP, SMU dan SMK
- g. Fasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan SLTP, SMU, dan SMK
- h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan manajemen SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku
- i. Evaluasi Ulangan Umum, evaluasi semester dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku
- j. Pemberian rekomendasi pendirian akreditasi penegerian dan pemberian bantuan pada SLTP, SMU dan SMK serta lembaga pendidikan swasta
- k. Perencanaan dan melaksanakan program Wajib belajar Pendidikan Dasar (13–15 tahun) sesuai dengan pedoman yang berlaku
- l. Perencanaan, pengusulan dan pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan revitalisasi gedung SLTP, SMU dan SMK.

Pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok di bidang pendidikan luar sekolah meliputi, antara lain :

- D. Penghimpunan dan perumusan kebijakan/ pedoman/ petunjuk teknis pembelajaran masyarakat, pengembangan kursus dan profesi luar sekolah, administrasi dan sarana pendidikan luar sekolah
- b. Penyusunan rencana/ program pembelajaran masyarakat, pengembangan kursus

dan profesi luar sekolah, administrasi dan sarana pendidikan luar sekolah

- c. Pembinaan pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) melalui Tempat Penitipan Anak (TPA) dan kelompok bermain
- d. Penuntasan buta huruf melalui pembinaan program Pemberantasan Buta Aksara (PBA) dan Keaksaraan Fungsional (KF)
- e. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SLTP dan Paket C setara SLTA.
- f. Pembinaan pembelajaran masyarakat, program Kelompok Belajar Usaha (KBU), program pengembangan pusat informasi dan jaringan (Pijarmas), program beasiswa Diklusemas sesuai dengan petunjuk teknis
- g. Fasilitasi peran serta masyarakat di bidang pembelajaran masyarakat
- h. Koordinasi, pengarahan dan petunjuk fungsional kepada petugas pengawas/penilik pendidikan masyarakat maupun Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- i. Pehabtanas Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP
- j. Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Sedangkan pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok di bidang pendidikan pemuda, olah raga dan kebudayaan meliputi, antara lain :

1. Penghimpunan dan perumusan kebijakan/ pedoman/ petunjuk teknis pembinaan pemuda, olah raga dan kebudayaan serta administrasi dan sarana pemuda, olah raga dan kebudayaan
2. Penyusunan rencana/ program pembinaan pemuda, olah raga dan kebudayaan, administrasi dan sarana pemuda, olah raga dan

kebudayaan

3. Penyiapan pelaksanaan kegiatan pembinaan generasi muda dan keolahragaan
4. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan generasi muda dan keolahragaan secara internal dan eksternal
5. Inventarisasi, dokumentasi organisasi/ badan/ lembaga yang melaksanakan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan serta kebudayaan
6. Penyiapan administrasi dan sarana  
Diklusepora
7. Penyiapan pengarahan dan petunjuk fungsional kepada Penilik Kebudayaan
8. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam rangka pembinaan  
Diklusepora.

5. **Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.**

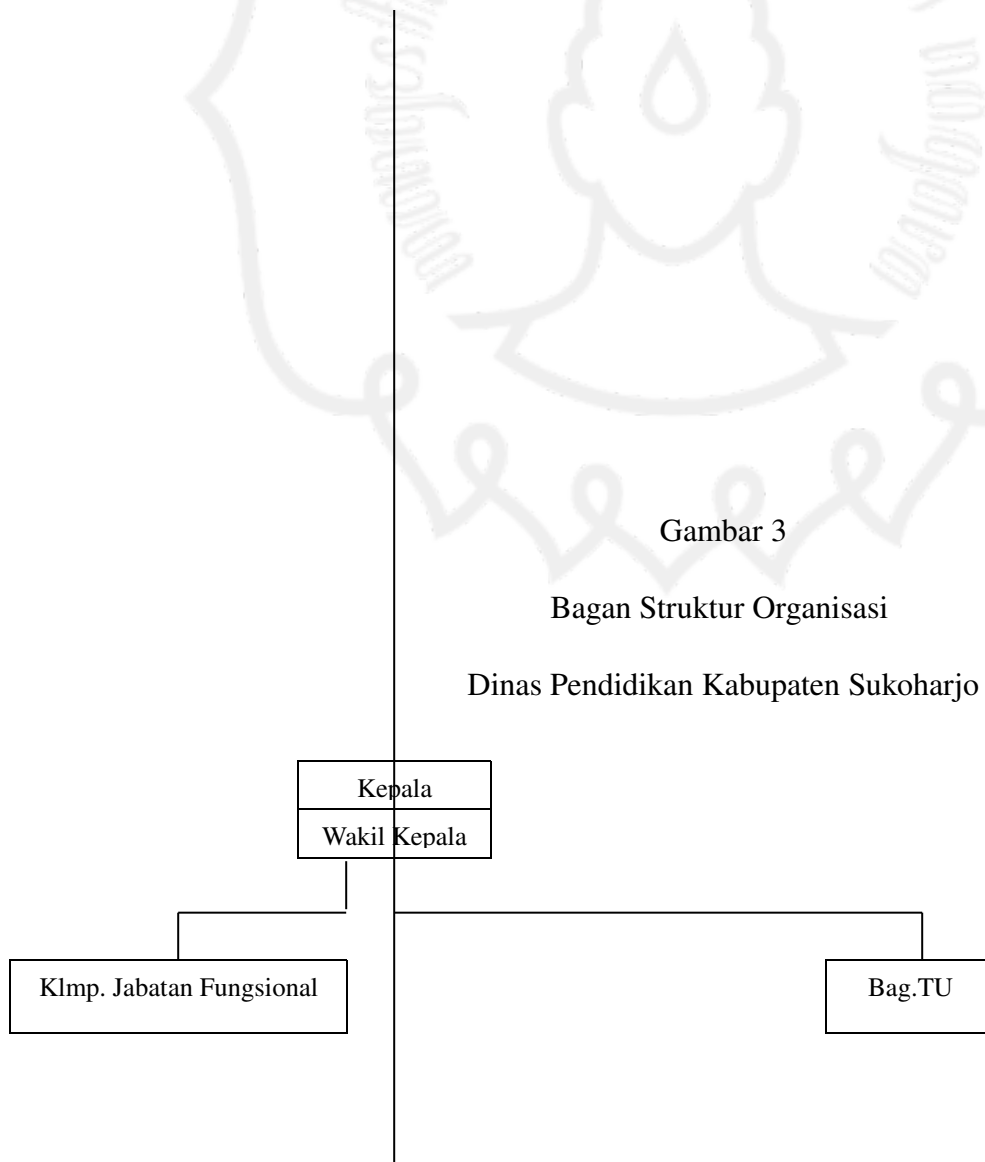
Adapun struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Sub Dinas Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Dasar Luar Biasa

(SDLB)

- c. Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- d. Sub Dinas Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- e. Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
- f. Sub Dinas Tenaga Kependidikan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Cabang Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

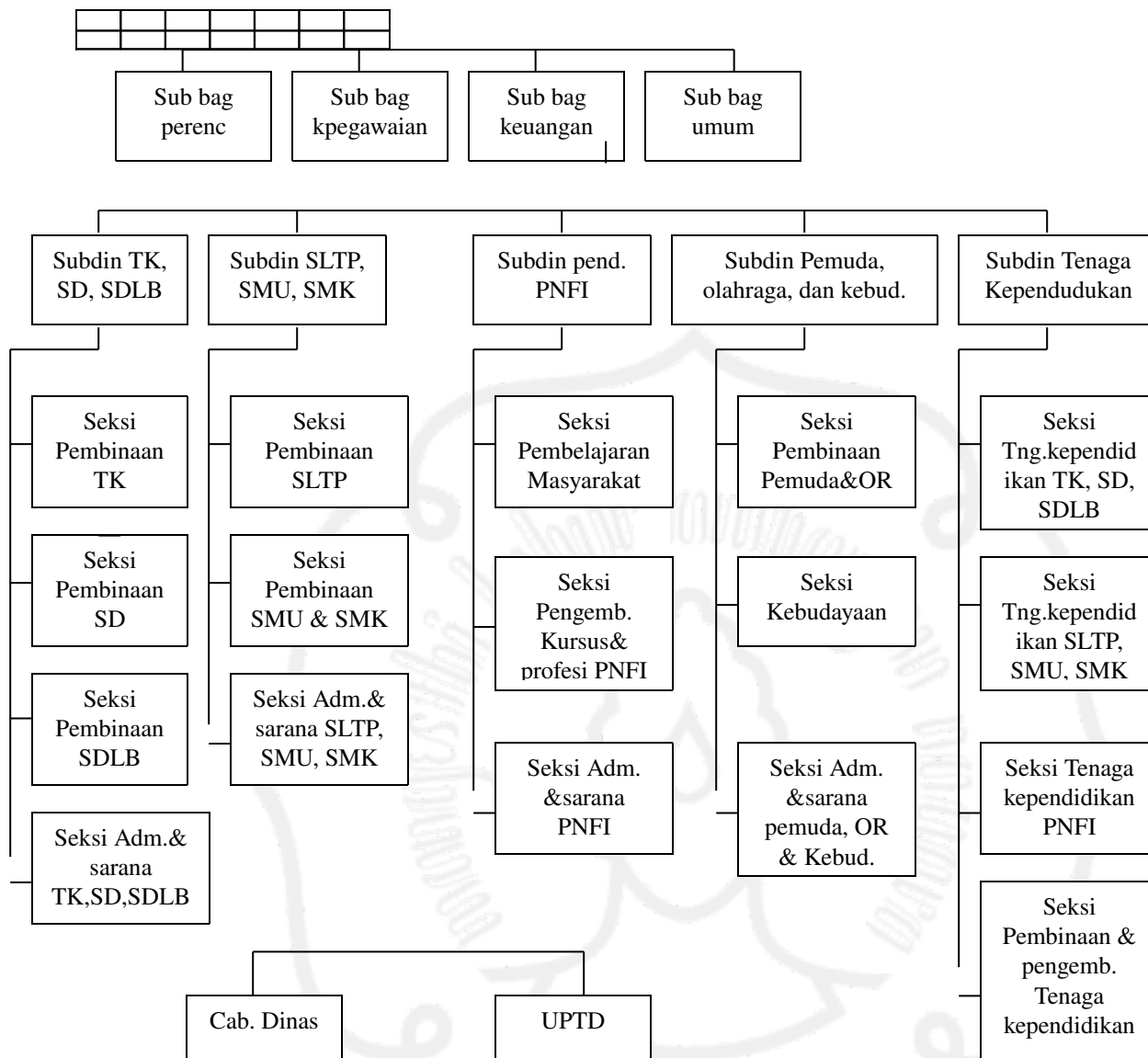
Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 3

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo



## B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

### 1. Letak Geografis Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo beralamat di Jalan Wandiyopranoto no. 59, Sukoharjo 57513 . Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Sukoharjo

sendiri terdiri dari 14 Kelurahan dan mempunyai 53 SD/MI Negeri, 2 SD Swasta, 1 TK Negeri, 23 TK Swasta, 7 Play Group, 2 Tempat Penitipan Anak (TPA).

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo**

Secara umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo mempunyai tugas pokok menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan menilai pelaksanaan kegiatan, ketatalaksanaan, pengawasan, perlengkapan, kekurangan persekolahan dan melaksanakan pembenahan kegiatan pendidikan luar sekolah melalui pendidikan di masyarakat, generasi muda keolahragaan, pembinaan seni pelajar di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas.

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sama tahunan pembinaan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
- b. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan pembinaan serta pengurusan TK, SD, Wajib Belajar, SDLB, Pendidikan Masyarakat, Kegiatan Pembinaan Generasi Muda, Keolahragaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- c. Membina TK, SD, Wajib Belajar, dan SDLB.
- d. Membina kegiatan Pendidikan Masyarakat.
- e. Membina kegiatan generasi muda termasuk kegiatan pembinaan kesiswaan.
- f. Membina kegiatan keolahragaan.



- g. Membina kegiatan pengembangan kebudayaan.
- h. Pembinaan surat-menyurat dan kearsipan kantor.
- i. Mengelola urusan rumah tangga kantor yang meliputi pemeliharaan, ketertiban dan keamanan, kebersihan dan keindahan kantor serta penerimaan tamu keprotokolan.
- j. Mengelola urusan tata usaha kepegawaian di lingkungan kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Mengelola perlengkapan di lingkungan kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
- l. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
- m. Mengkoordinasikan kegiatan tertentu pada TK, SD, dan SDLB di lingkungan kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi :
- 1) Perencanaan sekolah dalam rangka perencanaan regional tingkat kecamatan.
  - 2) Pengumpulan data pendidikan di lingkungan Kecamatan.
  - 3) Konsultasi dengan pimpinan instansi Kecamatan yang menyangkut bidang pendidikan.
  - 4) Koordinasi kegiatan kurikuler antar sekolah di tingkat Kecamatan.
  - 5) Penentuan kebijaksanaan dalam penerimaan murid di Kecamatan.
  - 6) Penanggulangan masalah umum yang menyangkut sekolah menengah di lingkungan Kecamatan.
- n. Menetapkan usul perjanjian

kursus yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

- o. Menyusun laporan kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo dikepalai oleh seorang Kepala UPTD. Tugas Pokok dan Fungsinya dispesifikasikan pada bagian-bagian yang sesuai dengan bidangnya yaitu :

- a. Urusan Tata Usaha

Tugas Pokok dan Fungsi yang dijalankan oleh Urusan Tata Usaha yaitu :

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- 2) Menyusun konsep rencana kerja UPTD.
- 3) Pendataan, pengumpulan, dan pengelolaan data.
- 4) Pendaftaran Wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan SMP.
- 5) Pendataan Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal yang menyangkut pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, keolahragaan, dan pembinaan kebudayaan.
- 6) Menertibkan pelaksanaan urusan persuratan lingkungan UPTD.
- 7) Melaksanakan ketertiban rumah tangga di lingkungan UPTD.
- 8) Menata kearsipan surat masuk dan keluar.
- 9) Memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Olah Raga dan Pemuda.
- 10) Mengkoordinir pelayanan beasiswa SD/MI.
- 11) Melaksanakan kegiatan Ujian Sekolah.

- 12) Mendata barang-barang.
- 13) Menyusun laporan UPTD selama 1 tahun dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 14) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tata Usaha.

b.

#### Urusan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi yang dijalankan oleh Urusan Kepegawaian adalah :

- 1) Membuat DUK pada akhir tahun
- 2) Pembuatan DP3 bagi guru dan non guru
- 3) Membuat program kerja
- 4) Mutasi gaji
- 5) Usulan kenaikan pangkat
- 6) Penjagaan pensiun
- 7) Rekap daftar hadir
- 8) Tiga bulan sekali melakukan pendataan PNS/ CPNS
- 9) Pengusulan ASKES
- 10) Pengusulan kartu TASPEN
- 11) Pengusulan KARPEG
- 12) Mengusulkan sumpah/ janji PNS
- 13) Mengusulkan ijin belajar dan menggunakan gelar
- 14) Pengusulan tanda penghargaan PNS
- 15) Pengisian buku administrasi kepegawaian dan memasukkan setiap ada mutasi/ perubahan pada file kepegawaian.
- 16) Mengusulkan cuti tahunan salin/ cuti besar/ cuti karena alasan penting.

c. Urusan Keuangan

Tugas Pokok dan Fungsi yang dijalankan oleh Urusan Keuangan yaitu

- 1) Mengusulkan gaji guru dan karyawan.
- 2) Mengambil gaji dan membayarkannya.
- 3) Melakukan pembukuan penggajian.

Dari Tugas Pokok dan Fungsi tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Keuangan. Jenis-jenis kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

- b. Mengambil daftar gaji guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten
  - i. Mengonsep, menetik, dan mengirim SPP gaji
  - ii. Mengonsep, menetik, dan mengirim mutasi gaji
  - iii. Mengambil daftar gaji Calin SPJ
  - iv. Mengambil gaji guru
  - v. Menggandakan, menjilid, dan mengirimkan SKUM PTK
  - vi. Mengkoordinir DPP
- d. Pengawas TK, SD, SDLB

Bidang ini secara umum mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan TK, SD, dan SDLB di tingkat Kecamatan.

e. Pendidikan Non Formal dan Informal

Bidang ini memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara.
- 2) Melaksanakan pendidikan Kejar Paket A, Kejar Paket B kelas I dan II, serta Kejar Paket C setara SMA kelas I dan II.
- 3) Mengani masalah kepemudaan seperti melakukan tindakan prefentif pemuda terhadap

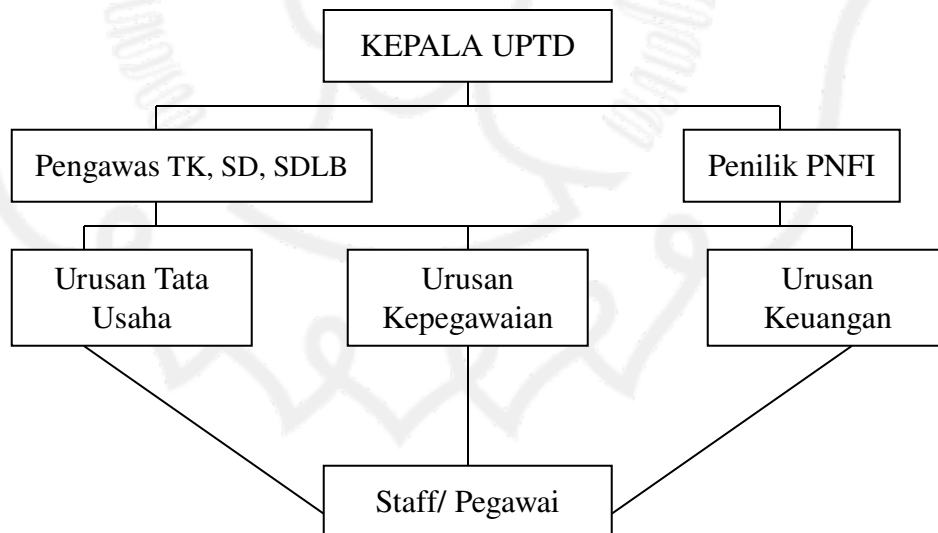
narkoba, pembinaan kepramukaan, dan melaksanakan lomba TUB dan PBB di tingkat Kecamatan.

- 4) Melakukan pembinaan guru Penjaskes dan pembinaan olah raga pelajar.
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini seperti perintisan dan kelembagaan serta pelatihan dan pembimbingan guru play group.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan kepemudaan dan seni..

### 3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo dapat digambarkan dalam suatu bagan sebagai berikut :

Gambar 4  
Bagan Struktur Organisasi  
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo



### C. Kecamatan Sukoharjo

Kecamatan Sukoharjo merupakan kecamatan kota yang terletak di pusat dari Kabupaten Sukoharjo, tepatnya kecamatan Sukoharjo disebut sebagai ibu kota Kabupaten Sukoharjo. Keberadaan wilayah Kecamatan Sukoharjo dibatasi oleh :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bendosari.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tawanghari.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Grogol.

Luas wilayah Kecamatan Sukoharjo yaitu 44,58 Km<sup>2</sup>. Luas Wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 466,66 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 12 Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Sukoharjo. Dengan demikian, luas wilayah Kecamatan sukoharjo merupakan 9,6 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sukoharjo.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Sektor pendidikan masih memegang peranan penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia yang rendah mutunya. Agar sumber daya manusia di Indonesia dapat bersaing

dan memegang peranan minimal di negaranya sendiri maka diperlukan suatu perencanaan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, termasuk Pendidikan Non Formal dan Informal. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sekali sumber daya manusia di Indonesia yang tidak berkompeten, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah bahkan banyak masyarakat terutama di pedesaan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali sehingga mengalami buta aksara. Untuk mengurangi tingkat buta aksara di Indonesia, maka pemerintah harus melakukan upaya-upaya pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh.

Hakikat pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Untuk mencapai masyarakat sejahtera barometer utamanya adalah pendidikan. Keterbelakangan pendidikan akan mengakibatkan terlambatnya menyerap informasi yang berkaitan dengan kemajuan, terlebih lagi mereka yang buta huruf sangatlah sulit untuk berkompetitif, mereka juga tidak dapat berkesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak serta kurang dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan tingkat keaksaraan masyarakatnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo menyelenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara dengan bentuk-bentuk pembelajaran yang ditujukan agar warga belajar mampu menulis, membaca, berhitung serta menganalisis tematik. Warga belajar tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran yang bersifat akademik, akan tetapi warga belajar juga diberi pelatihan keterampilan yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang sesuai dengan keadaan di lingkungan wilayah sekitar tempat tinggal warga belajar.

Pada pelaksanaan suatu program pemerintah umumnya terdapat hambatan ataupun

kekurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Untuk mengurangi hambatan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah atau sedang dijalankan. Evaluasi suatu program dimaksudkan agar pada pelaksanaan program yang akan datang dapat berjalan lebih baik.

Hal-hal yang dibahas oleh penulis yaitu tentang :

A. Pelaksanaan Program

Pemberantasan Buta Aksara

1. Langkah-langkah pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara
  - a. Langkah Persiapan
  - b. Langkah Pelaksanaan
  - c. Langkah Evaluasi dan Monitoring
  - d. Langkah Pelaporan dan Tindak lanjut

B. Evaluasi Pelaksanaan Program

Pemberantasan Buta Aksara

Hal-hal yang dievaluasi berkaitan dengan :

1. Evaluasi Konteks (*Contex*)

Hal-hal yang dievaluasi oleh Penulis berkaitan dengan Konteks :

- a. Tujuan Pelaksanaan Program
- b. Sasaran Pelaksanaan Program

2. Evaluasi Masukan (*Input*)

Hal-hal yang dievaluasi oleh Penulis berkaitan dengan Masukan :

- a. Kondisi Kelompok Sasaran
- b. Latar Belakang Pendidikan Pelaksana Program (Tutor)



- c. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Program
  - d. Dana Pelaksanaan Program
4. Evaluasi Proses (*Process*)

Hal-hal yang dievaluasi oleh Penulis berkaitan dengan Proses :

- a. Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara
  - b. Hambatan Pelaksanaan Program
4. Evaluasi Produk (*Product*)

Hal yang dievaluasi oleh Penulis berkaitan dengan Produk :

- g. Dampak Pelaksanaan Program.

### **A. Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara**

Dalam rangka pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, perlu dilakukan beberapa langkah agar dicapai pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyelenggara. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Langkah Persiapan

Langkah persiapan dalam program Pemberantasan Buta Aksara meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Sosialisasi

Sosialisasi program Pemberantasan Buta Aksara yang dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kecamatan Sukoharjo ini dilaksanakan pada bulan April 2007. Penilik Pendidikan Non Formal dan

Informal mensosialisasikan tentang program Pemberantasan Buta Aksara pada perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk dipublikasikan kepada masyarakatnya. Namun terdapat hambatan dalam proses sosialisasi yaitu sulitnya meyakinkan masyarakat untuk mengikuti program ini, karena memang masyarakat merasa tidak membutuhkannya. Selain itu, sosialisasi juga untuk menentukan pihak siapa yang bisa menjadi penyelenggara dan tutor. Penyelenggara adalah orang atau lembaga yang menyelenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara, sedangkan tutor adalah guru atau orang yang mengajar pada proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara.

Bentuk penyelenggara bisa berupa perorangan maupun kelompok. Untuk perorangan adalah setiap orang yang mempunyai keinginan mengabdikan dalam dunia pendidikan dan bersedia menyelenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara ini. Sedangkan apabila penyelenggaranya lembaga adalah organisasi kemasyarakatan. Keagamaan, LSM, yayasan, dan lain-lain yang mempunyai kemauan untuk menyelenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara.

Untuk kriteria penyelenggara bagi perorangan adalah sebagai berikut :

8. Berpendidikan minimal SLTA
9. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pendidikan minimal 2 tahun
10. Mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran.
11. Tidak terlibat tindakan kriminal

Sedangkan untuk kriteria penyelenggara sebuah lembaga adalah sebagai berikut :

- Memiliki Akte/ Badan Hukum/ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Memiliki pengalaman mengelola kegiatan pendidikan minimal 3 tahun.
- Memiliki data buta aksara.

- Memiliki sarana dan prasarana belajar
- Memiliki tenaga tutor dan tenaga administrasi
- Memiliki jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain (lokal, nasional, dan internasional)

Dalam proses penentuan penyelenggara juga diidentifikasi siapa saja yang bisa menjadi tutor bagi kelompok belajar yang akan dilaksanakan. Setiap warga masyarakat yang terpanggil jiwanya untuk membantu membelajarkan sesama dapat menjadi tutor dengan kriteria:

- Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat
- Bertempat tinggal di lokasi kegiatan belajar dilaksanakan (berasal dari daerah setempat)
- Mampu mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar warga belajar dan menguasai substansi materi yang akan dibelajarkan
- Mampu mengembangkan metode pembelajaran partisipatif dan memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan kewajibannya sebagai tutor.

Untuk program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo, penyelenggaranya adalah perorangan semua. Dalam melakukan sosialisasi dan penentuan identifikasi penyelenggara dan tutor dilaksanakan secara intensif oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat seperti Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW. Hal ini karena mereka yang lebih mengetahui karakteristik desanya dan bisa mengidentifikasi kira-kira siapa yang bisa menjadi penyelenggara.

Untuk pemilihan tutor biasanya juga diserahkan pada perangkat desa setempat. Tutor

diambil dari masyarakat setempat dengan pertimbangan tutor diharapkan sudah memahami karakter desa dan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, pemilihan tutor dan penyelenggara tidak harus sesuai dengan kriteria diatas karena belum tentu orang yang memenuhi kriteria mau menjadi penyelenggara dan tutor dikarenakan tugasnya sangat berat. Jadi untuk pemilihannya lebih menekankan pada yang memiliki kepedulian pada masyarakat dan mau mengabdikan.

Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Muhammad Rosyad, BA penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berikut ini :

“Pemilihan dan perekrutan tutor yang dilaksanakan pada bulan April telah selesai hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Sedangkan pemilihannya kami percayakan pada Kepala Desa disana, sekiranya kami sudah percaya pada kepala desa karena kepala desa yang lebih mengetahui karakteristik desanya masing-masing. Selain itu juga memang tidak mudah mencari tutor yang mau mengajar bapak-bapak maupun ibu-ibu dengan honor yang kecil seperti itu. Jadi disini kami memilih sesuai kriteria yang ada namun tidak terpaku pada kriteria tersebut, pokoknya yang penting dia mau mengabdikan untuk masyarakat. Mengajar ibu-ibu itu tidak mudah mbak, bahkan kadang yang datang cuma sedikit jadi ya memang dibutuhkan kesabaran. Hanya orang-orang yang terpanggil hatinya untuk mau menolong sesamanya yang bersedia menjadi tutor.” (Wawancara 25 Februari 2009)

Bapak Mugiyono, S. Pd juga Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo menambahkan sebagai berikut :

“Sebagian besar tutor yang mau membantu dalam pelaksanaan PBA ini berprofesi sebagai seorang Guru atau mereka yang peduli pada pendidikan, punya jiwa pengabdian pada masyarakat. Kalau tidak ya yang mau saja karena memang tugas ini berat, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Jadi kriteria tidak menjadi syarat mutlak untuk mencari tutor”  
(Wawancara 25 Februari 2009)

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemilihan tutor dan penyelenggara tidak harus mutlak sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemilihannya lebih

diutamakan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mau mengabdikan untuk masyarakat, hal ini berkenaan dengan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang bersifat non formal.

Dalam proses perekrutan penyelenggara dan tutor program Pemberantasan Buta Aksara ini, maka terjaring sebanyak 26 orang penyelenggara dan 26 orang tutor yang bersedia membantu pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara. (Data penyelenggara dan tutor terlampir). Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rosyad, BA Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kecamatan Sukoharjo :

“Perekrutan penyelenggara dan juga tutor yang hanya memakan waktu 1 bulan itu..sudah mampu terjaring 26 tutor dan 26 orang penyelenggara mbak. Saya kira dengan jumlah tersebut sudah cukuplah..untuk melaksanakan program ini. Yang penting kerelaan dan juga kemauan mereka dalam mengemban amanah ini. Karena tidak mudah jadi seorang tutor dan juga penyelenggara pada program pemerintah ini mbak.” (Wawancara 11 Februari 2009)

Setelah terpilih tutor dan penyelenggara, maka tutor dan penyelenggara dipanggil ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo untuk diberi pengarahan tentang pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara serta diberikan modul yang menjadi kurikulum pembelajaran. Modul tersebut dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan bahan ajarnya adalah bahan ajar tematik yaitu bahan ajar yang digunakan untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung, dan menganalisis tematik, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya.

b. Pendataan calon warga belajar

Setelah ditentukan siapa yang akan menjadi penyelenggara dan tutor maka dilakukan

pendataan awal untuk mengidentifikasi calon warga belajar program Pemberantasan Buta Aksara pada setiap desa. Pendataan merupakan kewenangan masing-masing desa yang bisa dilakukan oleh Kepala Desanya langsung atau Kepala Desa menunjuk tokoh-tokoh masyarakat setempat seperti PKK, Aisyiyah, atau pihak-pihak yang memahami karakteristik desanya untuk melakukan pendataan secara langsung. Data yang diperoleh digunakan sebagai data dasar desa mana saja yang perlu diselenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara. Kepala desa diberi waktu maksimal 1 bulan dalam melakukan pendataan calon warga belajar yang ada di daerahnya masing-masing. Dijadwalkan bahwa tahap pendataan calon peserta dilaksanakan pada bulan Mei 2007 lalu.

Ibu Letisia Masta, S. Psi tutor warga belajar menuturkan tentang pendataan yang beliau lakukan dimana beliau harus terjun langsung dan membujuk masyarakat agar memiliki kesadaran mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara. Beliau juga harus melakukan pendekatan langsung terhadap masyarakat agar mereka respon terhadap pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara. Berikut ini penuturan beliau :

“Gini mbak, dulu itu saya membuat pengumuman ke masyarakat desa melalui Bu Bayan dan Bu Bayan menyampaikannya lewat PKK, kemudian ditawarkan kepada siapa-siapa saja yang mau ikut. Tadinya banyak yang takut untuk ikut mbak tapi saya melakukan pendekatan pada warga dan saya temui satu persatu orang yang kira-kira pantas untuk mengikuti program PBA ini. Saya bilang tidak apa-apa Bu, ini cuma belajar bersama, dan saya beri pengertian pada mereka kalau bisa membaca menulis itu penting. Alhamdulillah warga desa Bulakrejo sini banyak yang mau ikut, pada awal pendataan calon warga belajar program PBA yang saya lakukan tersebut telah berhasil memperoleh 70 orang calon warga belajar yang keseluruhannya adalah ibu-ibu. Namun setelah di data ulang dalam pendataan berikutnya jumlah calon warga belajar meningkat menjadi 130 orang.” (Wawancara 30 Januari 2009)

Pendataan dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal dan dibantu oleh perangkat desa, tokoh masyarakat serta tutor maupun penyelenggara program Pemberantasan Buta Aksara dengan terjun langsung ke masyarakat dan memberikan

sosialisasi tentang program Pemberantasan Buta Aksara serta memberi pemahaman tentang pentingnya program ini. Mereka memberikan penawaran kepada masyarakat untuk mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara secara gratis. Mereka juga berusaha memberi pengertian kepada penyandang buta aksara agar mau mengikuti program ini.

Dari pendataan calon warga belajar periode tahun 2007/2008, terjaring 394 orang penyandang buta aksara di Kecamatan Sukoharjo. Calon warga belajar sejumlah 394 orang tersebut terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Bulakan, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Begajah, Kelurahan Mandan, Kelurahan Banmati, dan Kelurahan Dukuh. (Data warga belajar terlampir)

Masih banyak perangkat desa maupun tokoh-tokoh masyarakat yang kurang respon terhadap apa yang disampaikan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo yaitu memberi tugas kepada perangkat desa maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat pada saat proses sosialisasi program Pemberantasan Buta Aksara kepada warganya, padahal kinerja Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo sudah cukup baik. Hal itu mengakibatkan data yang masuk ke kantor tidak sesuai yang diharapkan atau hasil pendataan tidak sesuai harapan.

Berikut ini penuturan Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo mengenai pendataan yang dilakukan oleh aparat :

“Pada saat kami sosialisasi kami meminta bantuan kepada PKK dan perangkat desa setempat, kami berikan blanko-blankonya kemudian dibawa pulang. Di lapangan mereka melakukan pendataan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ada yang menanggapi secara serius ada yang masa bodoh akan hal ini. Faktanya, setelah di data ulang jumlah warga penyandang buta aksara di lapangan berbeda dengan jumlah warga yang telah tercatat menjadi calon warga belajar. Masih ada warga

penyandang buta aksara yang belum terjangkau untuk mengikuti program PBA ini, sehingga setelah data masuk ke kantor kami harus merevisi kembali.”  
(Wawancara 25 Februari 2009)

Untuk mengatasi hal tersebut maka Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal harus selektif dalam memilih perangkat desa yang akan ditugaskan untuk mensosialisasikan program Pemberantasan Buta Aksara dan mendata calon warga belajar, yaitu dengan memilih orang-orang yang mempunyai kerelaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang masih menyandang status buta aksara.

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa pendataan calon warga belajar di Kecamatan Sukoharjo telah dilakukan oleh berbagai pihak yaitu dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan, tutor dan penyelenggara program Pemberantasan Buta Aksara, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Dalam proses pendataan calon warga belajar hanya terdapat sedikit hambatan, yaitu rendahnya responsivitas perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam mensosialisasikan dan juga mendata calon warga belajar program Pemberantasan Buta Aksara. Pemilihan orang-orang yang tepat, dapat menjadi solusinya.

c. Pengajuan proposal

Setelah didapat siapa yang menjadi penyelenggara dan tutor serta sudah teridentifikasi calon warga belajar program Pemberantasan Buta Aksara, maka penyelenggara Pemberantasan Buta Aksara menyusun dan mengajukan proposal penyelenggaraan program Pemberantasan Buta Aksara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo kemudian mengajukan proposal program Pemberantasan Buta Aksara tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Petugas PNFI  
Kecamatan

Petugas PNFI  
Kabupaten

Petugas PNFI  
Provinsi



melakukan penilaian terhadap proposal yang telah diajukan tersebut, dengan pertimbangan apakah disetujui atau tidak. Selanjutnya, jika proposal disetujui maka antara penyelenggara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menandatangani akad kerja sama. Pengajuan proposal dilakukan pada bulan Juni 2007, akan tetapi pada kenyataannya dana baru bisa cair pada bulan September 2007. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan setelah semua proses diatas telah selesai. Berikut ini mekanisme pengajuan proposalnya :

→ →  
Proposal yang diajukan berisi antara lain sebagai berikut :

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Jumlah warga belajar yang akan dibelajarkan
- d. Jumlah tenaga tutor
- e. Jumlah biaya yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut :
  - Manajemen : 10%
  - Bahan : 15%
  - Kegiatan belajar : 35%  
(Honor tutor, ATK, Transport)
  - Kemandirian : 30%
  - Monitoring Evaluasi : 10%
  - Pelaporan : 5%
- b. Langkah Pelaksanaan

Proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara dapat dilaksanakan setelah adanya akad kerja sama antara penyelenggara program Pemberantasan Buta Aksara dengan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi 3 tahapan :

a. Tahap Pemberantasan (Tahap I) dilaksanakan Juli-Desember 2007

Pada tahap Pemberantasan ini, materi yang diberikan adalah materi dasar membaca, menulis dan berhitung. Tutor memberikan materi awal dengan mengenalkan huruf abjad kemudian membantu warga belajarnya untuk dapat menghafal huruf-huruf. Setelah warga belajar mampu mengenal dan menghafal huruf-huruf abjad, kemudian tutor mengajari para warga belajar untuk berlatih mengeja suku kata. Jika hal itu sudah bisa dilakukan oleh warga belajar dengan benar, maka tutor akan menambah tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran tahap I ini, yaitu dengan mengajari warga belajar mengeja dan berlatih membaca kata sederhana. Untuk materi berhitung di tahap I ini, tutor memberi materi dengan menggunakan angka-angka yang sangat sederhana.

Pada rentang waktu bulan Juli-Desember 2007 kelompok belajar yang telah melalui tahap pemberantasan adalah :

- Kelompok belajar : Arumsari 1  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 1 laki-laki dan 9 perempuan
- Kelompok belajar : Arumsari 2  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 10 perempuan
- Kelompok belajar : Arumsari 3  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 10 perempuan

- Kelompok belajar : Ngudi Kawruh 1  
Kelurahan : Sonorejo  
Jumlah warga belajar : 10 perempuan
- Kelompok belajar : Ngudi Kawruh 2  
Kelurahan : Sonorejo  
Jumlah warga belajar : 10 perempuan
- Kelompok belajar : Dahlia 1  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 10 perempuan
- Kelompok belajar : Dahlia 2  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 10 perempuan
- Kelompok belajar : Marsudi Ilmu  
Kelurahan : Sonorejo  
Jumlah warga belajar : 12 perempuan
- Kelompok belajar : Semangat 1  
Kelurahan : Begajah  
Jumlah warga belajar : 11 perempuan
- Kelompok belajar : Semangat 2  
Kelurahan : Begajah  
Jumlah warga belajar : 3 laki-laki dan 13 perempuan
- Kelompok Belajar : Anggrek 1  
Kelurahan : Sonorejo

Jumlah warga belajar : 6 laki-laki dan 4 perempuan

b. Tahap Pembinaan (Tahap II) dilaksanakan Januari-Juni 2008

Setelah melalui tahap I, maka pada tahap II ini warga belajar akan diberi materi pembelajaran yang tingkatannya lebih sulit. Awalnya tutor akan mengulang kembali materi dasar yang telah diberikan pada tahap I. Selanjutnya, tutor mengajarkan kepada warga belajar untuk membaca kalimat sederhana. Tutor juga meningkatkan keterampilan berhitung warga belajarnya dengan mengajari mereka mengoperasikan tanda hitung pertambahan ( + ) dan pengurangan ( - ).

Pada rentang waktu bulan Januari-Juni 2008 kelompok belajar yang telah melalui tahap pembinaan adalah :

- Kelompok belajar : Mekarsari  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 5 laki-laki dan 5 perempuan
- Kelompok belajar : Mekar Arum 1  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 9 laki-laki dan 11 perempuan
- Kelompok belajar : Mekar Arum 2  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 9 laki-laki dan 11 perempuan
- Kelompok belajar : Mulya 1  
Kelurahan : Sukoharjo  
Jumlah warga belajar : 11 perempuan
- Kelompok belajar : Mulya 2

Kelurahan : Sukoharjo

Jumlah warga belajar : 10 perempuan

- Kelompok belajar : Ngudi Ilmu 3

Kelurahan : Sonorejo

Jumlah warga belajar : 10 laki-laki

- Kelompok belajar : Mangun Karso

Kelurahan : Bulakan

Jumlah warga belajar : 4 laki-laki dan 6 perempuan

- Kelompok belajar : Angrek 1

Kelurahan : Sonorejo

Jumlah warga belajar : 10 perempuan

c. Tahap Pelestarian (Tahap III) dilaksanakan Juli-Desember 2008

Pada tahap III ini warga belajar diajarkan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks, misalnya membaca dan menulis paragraf sederhana. Sedangkan untuk materi berhitung, tutor telah mengajarkan cara pengoperasian perkalian ( $\times$ ) dan pembagian ( $:$ ). Pada rentang waktu bulan Juli-Desember 2008 kelompok belajar yang telah melalui tahap pelestarian adalah :

- Kelompok belajar : Budi Utomo 1

Kelurahan : Mandan

Jumlah warga belajar : 4 laki-laki dan 6 perempuan

- Kelompok belajar : Budi Utomo 2

Kelurahan : Mandan

Jumlah warga belajar : 3 laki-laki dan 7 perempuan

- Kelompok belajar : Budi Utomo 3  
Kelurahan : Mandan  
Jumlah warga belajar : 5 laki-laki dan 5 perempuan
- Kelompok belajar : Mawar 1  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 4 laki-laki dan 6 perempuan
- Kelompok belajar : Mawar 2  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 2 laki-laki dan 8 perempuan
- Kelompok belajar : Nusa Indah  
Kelurahan : Bulakrejo  
Jumlah warga belajar : 3 laki-laki dan 7 perempuan
- Kelompok belajar : Ngudi Ilmu 1  
Kelurahan : Sonorejo  
Jumlah warga belajar : 11 perempuan
- Kelompok belajar : Bima  
Kelurahan : Bulakan  
Jumlah warga belajar : 9 laki-laki dan 9 perempuan
- Kelompok belajar : Kunthi  
Kelurahan : Bulakan  
Jumlah warga belajar : 2 laki-laki dan 8 perempuan
- Kelompok belajar : Puntodewa  
Kelurahan : Dukuh

Jumlah warga belajar : 6 laki-laki dan 14 perempuan

- Kelompok belajar : Arjuno

Kelurahan : Banmati

Jumlah warga belajar : 14 laki-laki dan 6 perempuan

- Kelompok belajar : Kumbokarno

Kelurahan : Dukuh

Jumlah warga belajar : 9 laki-laki dan 5 perempuan

- Kelompok belajar : Irawan

Kelurahan : Banmati

Jumlah warga belajar : 8 laki-laki dan 13 perempuan

- Kelompok belajar : Mawar 1

Kelurahan : Bulakrejo

Jumlah warga belajar : 4 laki-laki dan 6 perempuan

Proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara (PBA) yang dilaksanakan di rumah penduduk dengan jadwal pembelajaran 2 kali dalam 1 minggu. Setiap kelompok belajar memiliki jadwal yang berbeda dengan kelompok belajar yang lain. Tahap I hingga tahap III, warga belajar juga diberi keterampilan fungsional, misalnya : cara membuat tape singkong, susu kedelai, kue, rambak, dan lain sebagainya.

### 3. Langkah Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi reguler dilakukan untuk mengetahui perkembangan kelompok belajar dan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dengan pemantauan reguler maka kegiatan pembelajaran dapat terkendali. Monitoring dan evaluasi merupakan upaya pengendalian dan pembinaan yang terus menerus sejak tahap persiapan, pelaksanaan, dan

tindak lanjut, maka dalam proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dari waktu ke waktu yang menyangkut keadaan warga belajar, sarana belajar, proses dan isi materi belajar. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara rutin dan teratur, sehingga setiap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pembinaan dan pelaksanaan program di lapangan dapat segera dicarikan jalan pemecahannya atau diberikan masukan dalam rangka perbaikan program.

Monitoring dilakukan secara mingguan, bulanan, dan pada akhir kegiatan pembelajaran. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo memonitoring dengan turun langsung meninjau ke lokasi pembelajaran setiap minggunya, sedangkan petugas dari Sie Kesetaraan dan Keaksaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo memonitoring tiap bulan dan tiap akhir pembelajaran.

Selain terjun langsung, monitoring juga bisa dilakukan tidak secara langsung ke lokasi pembelajaran namun dengan jalan mengakses informasi dari tutor dan penyelenggara tentang proses pembelajaran di masing-masing Kelurahan.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kelompok belajar dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang keaksaraan. Yang terlibat saat evaluasi terutama adalah tutor dibantu dari tim Kecamatan yang langsung terjun mengevaluasi kelompok belajar. Pelaksanaan evaluasi melibatkan tutor. Bentuk evaluasinya adalah para warga belajar diberi soal yang telah disesuaikan dengan kurikulum dari Dinas Pendidikan Kabupaten kemudian dikerjakan dan diberi skor sesuai dengan benar dan salahnya. Materi ujian yang diberikan adalah sesuai dengan materi pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara yang berisi materi membaca, menulis, dan berhitung serta tentang keterampilan fungsionalnya.

Berikut penuturan Bapak Mugiyono, S. Pd selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan



Informal Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo :

“Jika dilihat dari kuantitasnya, memang telah mencapai 100%. Dalam artian begini mbak, dulu waktu pendataan calon warga belajar, tercatat 394 orang peserta dan sampai sekarang setelah lulus dan mendapat sertifikat juga terdapat jumlah yang sama, yaitu jumlah nya 394 orang. Akan tetapi, jika dilihat dari kualitasnya hanya mencapai 95% dari targetnya. Masalahnya, waktu proses pembelajaran yang kadang tidak sesuai jadwal karena kesibukan masing-masing warga belajar. Tapi itu sudah bagus, sudah bisa dikatakan berhasil!!” (Wawancara 11 Februari 2009)

Dari penuturan Bapak Mugiyono, S. Pd tersebut, dapat diambil informasi bahwa secara kuantitas, pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara telah mencapai target 100% dari jumlah sasaran, yaitu 394 orang, tetapi secara kualitas baru mencapai 95% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya warga belajar yang belum lancar membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut.

#### 4. Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok belajar sampai dengan tingkat pusat. Pihak penyelenggara dan tutor memberikan laporannya pada tingkat Kecamatan yaitu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo secara berkala.

Dalam kegiatan pelaporan ini tutor ataupun penyelenggara wajib memberikan laporan yang sebenarnya tentang bagaimana keadaan kelompok belajar yang ditanganinya agar apabila ada masalah dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo memberikan laporannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo khususnya kepada Sie Kesetaraan dan Keaksaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Untuk selanjutnya Sie Kesetaraan dan Keaksaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Kabupaten meneruskan laporan tersebut

ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.

Hal-hal yang dilaporkan menyangkut :

c. Proses belajar mengajar

Proses pembelajaran harus sesuai jadwal, yaitu tahap I selama 6 bulan, tahap II selama 6 bulan, dan tahap III juga berlangsung selama 6 Bulan.

d. Perkembangan dan kemajuan warga belajar

Untuk mengetahui perkembangan warga belajar, maka perlu dilakukan monitoring. Monitoring dilakukan tiap minggu yang dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan dan tiap Bulan dilakukan oleh petugas Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Namun biasanya tiap tahap petugas Kabupaten hanya melakukan 1 kali monitoring, yaitu pada tahap I monitoring dilaksanakan bulan September, pada tahap II monitoring dilaksanakan bulan Mei, sedangkan pada tahap III monitoring dilaksanakan pada bulan Desember.

e. Kegiatan dan hasil belajar

Setelah melalui proses pembelajaran selama 6 (enam) bulan pada tiap tahapannya, yaitu tahap I dilaksanakan di bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2007, tahap II dilaksanakan di bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008, dan tahap III dilaksanakan di bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2008. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, perlu dilaksanakan evaluasi yang berupa uji kompetensi keaksaraan fungsional, yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

Untuk tingkat Kecamatan Sukoharjo, uji kompetensi program Pemberantasan Buta

Aksara tahap I serentak dilaksanakan di masing-masing tempat pembelajaran pada tanggal 10 Desember 2007, mulai jam 19.00 WIB sampai dengan selesai, tahap II dilaksanakan pada bulan Juni 2008 dan tahap III dilaksanakan pada bulan Desember 2008 yang diikuti semua warga belajar program Pemberantasan Buta Aksara yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

f. Hambatan selama proses pembelajaran

Dalam proses pembelajaran masih sering terjadi penundaan jadwal belajar, hal itu disebabkan karena banyak warga belajar yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah sehingga tidak menepati jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan. Banyak warga belajar yang tidak mau datang kalau tidak dijemput oleh tutornya sendiri, ada yang malu untuk ikut kegiatan belajar, ada yang dengan alasan banyak pekerjaan maka mereka mengurungkan niatnya untuk belajar, atau bahkan ada yang memang malas untuk ikut belajar.

Hambatan yang paling dirasakan yaitu ketidakmampuan warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga secara kualitas masih ada yang belum optimal dalam menguasai materi pembelajaran. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara adalah melakukan program Jaring Garap. Program Jaring Garap ini bertujuan untuk membelajarkan kembali para warga belajar yang belum benar-benar mampu menguasai materi pembelajaran.

**B.**

**Evaluasi**

**Pelaksanaan**

**Program Pemberantasan Buta Aksara**

Evaluasi suatu program ditujukan untuk mengukur efek suatu program dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan, sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program itu dan peningkatan program di masa yang akan datang agar lebih baik.

Untuk mengukur atau menilai apakah suatu program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, maka harus dilihat dulu pelaksanaannya. Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan tersebut, maka salah satunya dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Contex, Input, Process, and Product*) dengan empat sasaran penilaian, yaitu : konteks, masukan, proses, produk.

Penulis menggunakan model evaluasi CIPP (*Contex, Input, Process, and Product*) ini untuk mengevaluasi program Pemberantasan Buta Aksara. Berikut ini hal-hal yang akan penulis evaluasi :

- Evaluasi Konteks (*Contex*)

Evaluasi konteks merupakan penilaian yang mengarah pada konteks kebutuhan yang terkait dengan lingkungan. Evaluasi ini menggambarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan program, yang menyangkut tujuan dan sasaran pelaksanaan program. Penilaian (Evaluasi) konteks dilakukan untuk menjawab pertanyaan “apakah tujuan yang ingin dicapai dan yang telah dirumuskan oleh program benar-benar dibutuhkan berkaitan dengan lingkungan?” Dan menjawab pertanyaan, “apakah sasaran telah sesuai dengan tujuan program?” Hal-hal yang dievaluasi oleh penulis berkaitan dengan konteks (*Contex*) :

- a. Tujuan Pelaksanaan Program

Tujuan diselenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara di Wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah :

- 1) Memberantas buta aksara dan memberikan kesempatan belajar warga masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

- 2) Memberi bekal keterampilan usaha sambil belajar kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- 3) Memberikan wawasan kepada masyarakat akan arti pentingnya belajar dan memiliki pengetahuan dan keterampilan.

Tujuan program Pemberantasan Buta Aksara menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan membaca, menulis, berhitung, dan tematik serta keterampilan fungsional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.
- 2) Menggali potensi dan sumber-sumber kehidupan yang ada di lingkungan sekitar warga belajar untuk memecahkan masalah keaksaraannya.
- 3) Memberi bekal keterampilan kepada warga belajar agar dapat mandiri.

(Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, 2006 : 31).

Seperti yang disampaikan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal, Bapak Muhammad Rosyad, BA :

“Tujuan dari program PBA ini sudah kami terapkan dalam pelaksanaannya mbak, yaitu dengan pemberian materi calistung atau baca tulis dan berhitung serta pemberian materi keterampilan fungsional kepada warga belajar yang mengikuti program PBA ini pada dasarnya tujuan utamanya adalah menjadikan masyarakat mampu membaca, menulis dan juga berhitung. Sedangkan keterampilan fungsional yang diberikan kepada warga belajar itu merupakan stimulus untuk menarik minat warga belajar agar mau datang dan lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran program PBA ini.”

(Wawancara 25 Februari 2009)

Bu Mus sebagai salah satu warga belajar program Pemberantasan Buta Aksara mengatakan bahwa :

“Saya senang sekali mbak, diberi kesempatan belajar membaca dan menulis. soalnya

dahulu waktu belum bisa membaca, saya sering dibohongi oleh suami saya. Tetapi sekarang saya sudah pintar membaca SMS, jadi suami saya tidak bisa membohongi saya lagi!”. (Wawancara 31 Januari 2009)

Para warga belajar juga mengakui akan pentingnya mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara dan sudah merasakan manfaatnya, seperti yang dikemukakan Ibu Kembuk selaku warga belajar berikut ini :

“Saya mengucapkan terimakasih, sudah ada program seperti ini, sekarang sudah bisa membaca sedikit-sedikit. Dulu saya tidak menyangka akan ada kemajuan seperti ini, jadi menyepelkan arti pentingnya sekolah. Maka dari itu saya senang sekali bisa belajar seperti ini, jadi bisa membaca dan menulis. Selain itu saya juga diberi pembelajaran tentang berbagai macam keterampilan, misalnya : membuat kue mandarin, dipraktikkan cara membuat susu kedelai, membuat rambak juga...” (Wawancara 31 Januari 2009)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi tujuan dari program Pemberantasan Buta Aksara ini telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat penyandang buta aksara. Adanya kesesuaian tujuan pemerintah untuk memberantas buta aksara dan keinginan masyarakat untuk mau mengikuti proses pembelajaran agar dapat mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta memperoleh keterampilan fungsional yang sesuai dengan potensi wilayah di daerahnya masing-masing.

#### b. Sasaran Pelaksanaan Program

Dilihat dari tujuan dari program Pemberantasan Buta Aksara, maka dapat diketahui pula siapa saja yang menjadi sasaran pelaksanaan program ini. Sasaran program Pemberantasan Buta Aksara adalah warga masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Untuk lebih jelasnya, bapak Muhammad Rosyad, BA Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal menjelaskan :

“Yang menjadi sasaran program PBA ini adalah orang-orang yang belum bisa membaca atau sudah pernah mendapatkan pendidikan akan tetapi putus ditengah jalan. Dengan batasan usia 15 tahun ke atas. Jadi masyarakat yang sudah pernah mengenyam

pendidikan tapi putus sekolah juga dapat mengikuti program ini. Karena biasanya, walaupun sudah pernah mengenyam pendidikan tapi tidak pernah dilatih maka lama-kelamaan bisa lupa.” (Wawancara 31 Januari 2009)

Diungkapkan Ibu Jum peserta kelompok belajar di Kelurahan Bulakrejo:

“Dulu saya itu sudah sekolah kelas 4, namun saya menikah sebelum lulus SD dan sekarang sudah mempunyai suami sehingga saya malu untuk sekolah lagi. Setelah itu tidak pernah belajar lagi sehingga saya menjadi lupa mbak, tidak bisa membaca lagi. Sekarang setelah mengikuti PBA saya menjadi ingat lagi, bisa membaca lagi. Saya sangat merasakan manfaatnya mbak.” (Wawancara 31 Januari 2009)

Dapat disimpulkan bahwa sasaran program Pemberantasan Buta Aksara ini sudah sesuai dengan tujuannya. Warga belajar yang mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara ini telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pelaksana program Pemberantasan Buta Aksara.

- Evaluasi Masukan (*Input*)

Evaluasi masukan (*Input*) ini mengarah pada masukan-masukan yang akan diproses dalam rangka pencapaian tujuan program. Evaluasi ini juga menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program.

Hal-hal yang dievaluasi oleh penulis berkaitan dengan masukan (*Input*) :

- o Kondisi Kelompok Sasaran

Kondisi kelompok sasaran merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dinilai, karena kelompok sasaran ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo ini.

Berikut pemaparan Bapak Mugiyono, S. Pd selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo tentang kondisi kelompok sasaran (warga belajar) :

“Karena program ini yang menghendaki adalah Pemerintah dan kami selaku pelaksana, sementara masyarakat sama sekali tidak menghendaki dan bukan permintaan masyarakat sehingga responnya hanya sekian persen, maksud saya tidak 100% ditanggapi. Misal sekali pembelajaran seharusnya yang hadir 10 orang tetapi yang hadir hanya 8 orang atau bahkan hanya 6 orang saja. Itupun tidak masalah karena kami memang sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Akan tetapi setelah proses pembelajaran berlangsung, warga belajar juga terlihat semangat dan aktif. Memang tergantung tutornya mbak, pandai-pandainya tutor saja dalam membuat suasana belajar menjadi menyenangkan dan tidak membosankan.”  
(Wawancara 31 Januari 2009)

Dari pemaparan bapak Mugiyono, S. Pd di atas, dapat ditangkap suatu informasi bahwa dibutuhkan keaktifan tutor untuk mensukseskan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa tidak membutuhkan dan tidak merasa rugi walaupun tidak mengikutinya. Namun ada pula warga belajar yang antusias ingin sekali bisa membaca dan menulis.

Selain itu, banyak warga belajar yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah sehingga tidak menepati jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan. Banyak warga belajar yang tidak mau datang kalau tidak dijemput oleh tutornya sendiri, ada yang malu untuk ikut kegiatan belajar, ada yang dengan alasan banyak pekerjaan maka mereka mengurungkan niatnya untuk belajar, atau bahkan ada yang memang malas untuk ikut belajar. Melihat hal ini maka tutor sangat berperan untuk memberi motivasi para warga belajar agar memiliki kesadaran penuh untuk mengikuti proses belajar. Tutor juga memiliki pengaruh yang besar dalam suksesnya pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini.

Ibu Saripah sebagai salah satu warga belajar dari program Pemberantasan Buta Aksara juga menuturkan bahwa :

“Saya hanya ikut-ikutan kegiatan ini, supaya mampu membaca mbak. Tetapi sebenarnya saya malu mengikuti proses pembelajaran. Sehingga terkadang saya malas jika harus menghadiri jadwal pembelajaran. Kalau tidak dijemput oleh Ibu Guru yang mengajar, saya terkadang tidak datang”. (Wawancara 31 Januari 2009)



Setelah mengkaji masalah tersebut, seharusnya dicari solusi untuk mengatasi sikap warga belajar yang malas untuk mengikuti proses pembelajaran, misalnya : dengan memberikan materi yang menarik dan yang disukai oleh warga belajar. Materi yang disampaikan juga harus menyesuaikan dengan keinginan warga belajar dan tidak terpaku pada modul karena kadang materi yang ada pada modul tidak bisa diterima oleh warga belajar, dan warga belajar tidak mau apabila materi yang disampaikan tidak mereka sukai. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi antara tutor dengan warga belajar materi apa yang akan dipelajari. Namun pada intinya pembelajaran bertujuan agar warga belajar mampu membaca, menulis, dan berhitung.

#### o Latar Belakang Pendidikan Pelaksana Program (Tutor)

Tutor adalah guru atau orang yang mengajar pada proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara. Mereka merupakan orang-orang yang terpanggil jiwanya untuk membantu membelajarkan sesama walau dengan imbalan yang sangat kecil. Kriteria umum sebagai seorang tutor adalah berpendidikan minimal SLTA atau sederajatnya serta mampu mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan menguasai substansi materi yang akan dibelajarkan.

Berikut merupakan daftar tingkat pendidikan tutor yang mengajar di program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo :

Tabel 2

Data Tenaga Pengajar (Tutor) Program Pemberantasan Buta Aksara  
Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007/2008

NO	NAMA TUTOR	PENDIDIKAN
1.	Mardi, A.Ma.Pd	D2
2.	Ponirah,A.Ma.Pd	D2
3.	Sarmiyati, S.Pd	S1
4.	Suryanti, S.Pd	S I
5.	Triyani, S.Pd.	S I
6.	Marmo, A,Ma.Pd	D2
7.	Siti Nurhayati, S. Pd	S I
8.	Darmi	D2
9.	Siti Mukaromah, S. Pd	S I
10.	Dewi Pujiyanti	D2
11.	Sumini	D2
12.	Sumarni	D2
13.	Warsini, S. Pd	S I
14.	Endang S, S.Pd.	S I
15.	Yekti Rahayu	D2
16.	Endah Werdiningsih,S. Pd	S I
17.	Letisia Masta, S. Psi	S I
18.	Agung Nugroho, S. Pd	S I
19.	Parjito, ST	S I
20.	Dyah Retnowati, S. Pd	S I

21.	Santi Setyaningrum, S.Pd	S I
22.	Enggustina Siwi, S.Pd	S I
23.	SK Supadmi,S.Pd	S I
24.	Megawati.P, SH	S I
25.	Maryati	SMA
26.	Parjoko	SMA

Dari data di atas, dapat dilihat walaupun sulit mencari tutor dengan kriteria yang telah ditentukan namun semua tutor yang mengajar di program Pemberantasan Buta Aksara telah memenuhi kriteria umum sebagai seorang tutor dalam pelaksanaan program ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kriteria umum untuk menjadi tutor dalam program Pemberantasan Buta Aksara ini adalah berpendidikan minimal SLTA dan dan tutor yang diperoleh merupakan orang-orang yang memiliki kepedulian pada masyarakat yang menyandang buta aksara.

#### o Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Program

Kegiatan pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara ini sudah mendapat dukungan dari Pemerintah yang berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi warga belajar sehingga para warga belajar tidak dituntut untuk membayar sedikitpun. Sarana dan prasarana tersebut sangat standar berupa alat tulis-menulis, namun sudah bisa mendukung berjalannya proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara.

Seperti yang diungkapkan Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berikut ini :

“Untuk alat tulis-menulis memang sudah ada dana dari Pemerintah mbak..sehingga warga belajar mengikuti kegiatan pembelajaran ini secara gratis dan tidak perlu membeli peralatan karena sudah menerima buku, pensil, penghapus, bolpoin. Kemudian untuk papan tulispun juga sudah ada biaya penyelenggaraannya. Sebenarnya dari Pemerintah sudah lengkap, walau baru berupa peralatan yang standar dan sederhana namun itu sudah mendukung dilaksanakannya PBA tadi

karena materi pembelajarannya juga sangat sederhana.” (Wawancara 02 Februari 2009)

Begitu juga dengan pengakuan ibu Parni, sebagai salah satu warga belajar program

Pemberantasan Buta Aksara ini :

“Saya sama sekali tidak dimintai uang pembayaran untuk proses pembelajaran mbak, semua peralatan tulis-menulis seperti : buku tulis, pensil, penghapus seperti itu diberi sama petugasnya.” (Wawancara 02 Februari 2009)

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan warga belajar sudah dipenuhi dalam hal sarana dan prasarananya. Dalam artian sudah tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk warga belajar program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo. Walaupun sarana dan prasarana masih bersifat sederhana namun sudah mampu mendukung proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara.

#### o Dana Pelaksanaan Program

Pendanaan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara adalah dari APBD I (Pemerintah Provinsi) dan dari APBD II (Pemerintah Kabupaten). Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo mengajukan proposal pada masing-masing sumber dana tersebut dalam rangka pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara.

Hal ini seperti yang disampaikan bapak Mugiyono, S. Pd selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berikut ini :

“Dana yang kami peroleh yaitu dari APBD I, dan APBD II, dan Insya Allah tidak ada yang ditahan, sudah dicairkan semua. Besarnya macam-macam, saya lupa mbak, pada intinya dana yang paling besar berasal dari APBD I.” (Wawancara 02 Februari 2009)

Perolehan dana dari APBD I untuk masing-masing kelompok belajar di Kecamatan Sukoharjo, yang meliputi : Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo,

Kelurahan Mandan, Kelurahan Bulakan, Kelurahan Banmati, dan Kelurahan Dukuh. Jumlah dana per kelompok adalah Rp 3.170.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Honorarium identifikasi warga/ tutor untuk kegiatan Buta Aksara : Rp 50.000
- Belanja Alat Tulis
  - a. Belanja alat tulis untuk warga belajar program Buta Aksara : Rp 100.000
  - b. Belanja alat tulis untuk administrasi penyelenggaraan kegiatan Buta Aksara : Rp 230.000
- Belanja penggandaan
  - a. Belanja cetak dan penggandaan soal tes untuk penilaian kegiatan Buta Aksara : Rp 45.000
  - b. Belanja cetak dan penggandaan untuk pelaporan kegiatan Buta Aksara :
    - Belanja cetak dan penggandaan untuk pelaporan tingkat Kabupaten : Rp 10.000
    - Belanja cetak dan penggandaan untuk pelaporan tingkat Kecamatan : Rp 15.000
    - Belanja cetak dan penggandaan untuk pelaporan tingkat Desa : Rp 20.000
- Belanja bahan baku
  - a. Belanja bahan keterampilan dan bahan sarana kegiatan Buta Aksara : Rp 600.000

- Belanja perjalanan Dinas dalam daerah  
(belanja perjalanan bagi tutor dan penyelenggara  
serta belanja transport kegiatan Buta Aksara)
  - a. Tutor : Rp 1.500.000
  - b. Penyelenggara :  
Rp 600.000

Sedangkan dana dari APBD II hanya mendapat bantuan honor tutor selama 6 bulan, masing-masing tutor mendapat Rp 100.000.

Jumlah tersebut merupakan hasil persetujuan proposal yang sudah diajukan sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, maka petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo memberikan dana tersebut kepada masing-masing penyelenggara untuk segera merealisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Pemberian dana dilakukan secara transparan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjelasan Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berikut ini :

“Alur dalam memperoleh dana seperti ini mbak, petugas Kecamatan dipanggil ke Kabupaten, yaitu kami para Penilik PNFI. Kemudian dari Kabupaten kami menerima penyaluran dana tersebut sesuai dengan jumlah kelompok yang sudah kami ajukan dulu. Setelah kami terima maka penyelenggara kami undang ke Unit Pelaksana Teknis Daerah sini dengan maksud dan tujuan kami berikan sosialisasi program-program kami dan juga pembagian biaya-biaya penyelenggaraan sesuai dengan jumlah alokasi rupiah masing-masing. Dalam pemberian dana ini semua komponen yang terkait mengetahui, sehingga kami laksanakan secara transparan dengan mengundang instansi terkait dan juga Camatnya.” (Wawancara 02 Februari 2009)

Pada prakteknya dana dengan jumlah tersebut masih sangat kurang dan sangat terbatas, baik yang berkenaan dengan biaya belajar mengajar ataupun honor tutor dan

penyelenggara. Namun sistem pendidikan program Pemberantasan Buta Aksara adalah dengan misi kemanusiaan yaitu untuk membantu saudara-saudara kita agar melek huruf sehingga tutor dan penyelenggara harus memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi karena dana yang tersedia sangat tidak sebanding dengan beban kerja yang didapat.

Ibu Endah Werdiningsih, S. Pd selaku tutor program Pemberantasan Buta Aksara mengatakan bahwa :

“Kami honor nya kecil mbak akan tetapi tidak mengapa..ini demi saudara kita supaya mereka mampu membaca dan menulis, kasihan mbak kalau mereka tidak bisa membaca dan menulis, mudah dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.” (Wawancara 02 Februari 2009)

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dana dari pemerintah kurang mencukupi untuk pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, akan tetapi kebesaran hati dan kerelaan para tutor nya dalam berupaya mensukseskan program pemerintah dalam hal Pemberantasan Buta Aksara di kalangan masyarakat, mampu menetralsir hambatan tersebut.

- Evaluasi Proses (*Process*)

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang mengarah pada bagaimana proses pelaksanaan program. Yang dinilai yaitu : “apakah pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan apakah muncul hambatan dalam proses pelaksanaan program?”

- o Pelaksanaan Program

Program Pemberantasan Buta Aksara ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, masing-masing tahapan berlangsung selama 6 bulan. Pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dijadwalkan tiap tahap harus memenuhi target, namun pada kenyataannya masih belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh penyelenggara karena masih terdapat kendala-kendala dalam ketepatan jadwal pembelajaran.

Proses pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara (PBA) tersebut dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo :

“Program PBA ini kan terdiri dari 3 tahapan ya mbak...seperti yang telah mbak ketahui sebelumnya. Nah...tiap tahapannya itu berlangsung selama 6 bulan, dimana pada tahap I itu berlangsung pada bulan Juli hingga bulan Desember 2007, tahap II nya dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni 2008, kemudian tahap ke III kami laksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2008. ketentuan dari Pemerintah, bahwa proses pembelajaran dilaksanakan 2 hari dalam seminggu, jadwal dari tiap-tiap kelompok belajar berbeda-beda tentunya..agar tidak terjadi tabrakan pada waktu proses pembelajaran.”  
(Wawancara 12 Maret 2009)

Setelah selesai melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara ini, maka penyelenggara harus melakukan penilaian terhadap warga belajarnya. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk menilai keberhasilan pembelajaran yang telah melalui 3 tahap tersebut. Cara penilaiannya dengan melakukan uji kompetensi. Tiap satu tahap selesai dilaksanakan, maka dilakukan uji kompetensi. Pada uji kompetensi program Pemberantasan Buta Aksara ini terdapat beberapa kriteria penilaian, yaitu :

- Tahap I
  - Menulis :warga belajar harus mampu mengenal huruf dan menyalin tulisan yang dibuat oleh tutor.
  - Membaca :warga belajar harus mampu mengenal huruf dan merangkai huruf menjadi kata.
  - Berhitung :warga belajar harus mampu mengenal angka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan.
- Tahap II



Menulis :warga belajar diharapkan mampu mengenal huruf, walaupun masih perlu bantuan dari orang lain untuk mengeja huruf-huruf tersebut guna merangkai kata atau menulis kalimat dengan bahasanya sendiri.

Membaca :warga belajar harus mampu membaca kata dan kalimat walaupun dengan dieja.

Berhitung :warga belajar harus mampu mengenal dan menggunakan angka dalam simbol hitung (+ dan -)

- Tahap III

Menulis :warga belajar harus mampu mengenal kata dan menyusun kalimat tanpa bantuan orang lain.

Membaca :warga belajar harus dapat membaca kalimat sederhana dengan benar serta dapat membaca satu paragraf sederhana dengan benar

Berhitung :warga belajar harus sudah mampu mengenal dan menggunakan angka dalam simbol hitung (x dan :)

Penilaian setelah proses pembelajaran pada intinya bertujuan untuk mengetahui hasil kemampuan fungsional warga belajar dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam program Pemberantasan Buta Aksara ini. Tutor dapat melakukannya dengan cara mereview bersama warga belajar, selama 1 periode kegiatan pembelajaran.

Berikut ini adalah penuturan dari Ibu Letisia Masta, S. Psi selaku tutor program Pemberantasan Buta Aksara:

“Kami para tutor, terutama saya pribadi berusaha bagaimana supaya warga belajar kami itu benar-benar menguasai materi yang kami berikan. Tolok ukur kami yaitu kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu minimal pada tahap I warga belajar sudah mampu mengenal huruf dan angka, selanjutnya di tahap II minimal warga belajar mampu mengeja kalimat, tahap III warga belajar harus bisa membaca dan berhitung secara mandiri. Jadi, sebisa mungkin tiap tahap dapat

tercapai target dari kriteria penilaian itu mbak...Caranya yaitu dengan memberi dorongan dan semangat warga belajarnya kalau sedang malas belajar, kalau tidak mau datang ya saya sendiri yang harus menjemputi mereka. Alhamdulillah...berkat itu semua warga belajar kami sudah bisa memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan.” (Wawancara 12 Maret 2009)

Hal tersebut diperkuat dengan penuturan Ibu Parni selaku salah satu warga belajar program Pemberantasan Buta Aksara :

“Iya mbak...saya memang sudah bisa menuli huruf, menulis surat sudah bisa, membaca tulisan-tulisan yang ada di jalan itu saya sudah bisa, menulis angka..pertambahan saya juga sudah bisa, dulu di ajari sama Bu Letisia. Saya senang sekali sekarang saya sudah lulus dan bisa membaca dan menulis, sehingga tidak bingung melihat tulisan-tulisan.”  
(Wawancara 12 Maret 2009)

Setelah proses belajar telah berakhir maka para warga belajar yang sudah lulus tes memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) I. Bagi mereka yang sudah memperoleh sertifikat tersebut kemudian berhak ikut program Pemberantasan Buta Aksara tahap kedua yang lamanya juga 6 bulan. Apabila lulus tahap kedua ini, maka warga belajar diberi sertifikat SUKMA II. Setelah tahap kedua lulus maka warga belajar berhak mengikuti tahap ketiga yang lamanya juga 6 bulan yang apabila lulus tahap ketiga ini akan diberi sertifikat SUKMA III. Apabila warga belajar sudah memperoleh sertifikat SUKMA III maka bisa direkomendasikan untuk mengikuti ujian Paket A setara SD dimana apabila lulus akan memperoleh sertifikat atau ijazah setara SD.

Berikut ini penuturan Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo tentang tahapan dalam perolehan sertifikat :

“Setelah pembelajaran selesai, kemudian warga belajar diberi tes atau ujian dan setelah lulus dengan kriteria tertentu maka kami berikan Sertifikat SUKMA I. Setelah itu berhak mengikuti tahap kedua yang kalau lulus bisa memperoleh Sertifikat SUKMA II yang lama pembelajarannya juga 6 bulan. Setelah SUKMA II yaitu SUKMA III dengan pembelajaran 6 bulan lagi. Setelah itu baru boleh

mengikuti ujian Paket A setara kelas 4 SD mbak..” (Wawancara 30 Januari 2009)

Dari wawancara-wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara adalah bertahap, dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Untuk dapat mengikuti ujian Kejar Paket A Setara kelas 4 SD maka warga belajar harus mengikuti ketiga tahap tersebut yang lamanya masing-masing 6 bulan. Dari tiap tahapan yang ada dalam program Pemberantasan Buta Aksara ini, para tutor sebisa mungkin dapat memenuhi target sesuai dengan batas kriteria penilaian yang harus bisa dikuasai oleh warga belajar dan dari hasil uji kompetensi dinyatakan bahwa warga belajar yang telah mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo ini telah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh pemerintah.

b. Hambatan Pelaksanaan Program

Faktor penghambat pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut :

vii. Nilai-nilai sosial

Adanya sikap masyarakat yang tidak mau dan malu menginformasikan bahwa ada diantara diri masyarakat yang buta aksara. Di samping itu, masih ada masyarakat yang beranggapan kurangnya manfaat yang dirasakan dari program pendidikan terhadap kehidupan sehari-hari, artinya meskipun berpendidikan belum tentu bisa menjamin kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian masyarakat tidak terdorong untuk mengikuti program pendidikan, termasuk program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo tersebut.

Untuk lebih jelasnya berikut ini penuturan Bapak Muhammad Rosyad, BA Penilik

Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo :

“Terkadang mereka tidak merasa membutuhkan, padahal kemampuan membaca dan menulis itu penting sekali untuk masyarakat, untuk peningkatan SDM dan mengentaskan mereka dari keterbelakangan. Toh mereka sebetulnya manusia seperti kita juga yang sangat butuh pendidikan, butuh ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya tetapi kenyataannya mereka tidak merasa butuh.”  
(Wawancara 02 Februari 2009)

Ibu Letisia Masta, S. Psi selaku tutor kelompok belajar juga mengungkapkan hal yang senada berikut ini :

“Sebenarnya masih banyak mbak yang belum bisa membaca dan menulis, di desa Bulakrejo sini saja terdapat 130 warga yang masih menyandang status buta aksara dan di desa ini pula yang merupakan daerah yang jumlah penduduk buta aksaranya paling banyak dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Sukoharjo, hanya saja mereka malu untuk mengikuti proses pembelajaran. Selain itu pola pikir mereka yang menganggap belajar maupun mempunyai kemampuan membaca dan menulis itu tidak penting, jadi menurut mereka kegiatan seperti ini tidak ada gunanya.”  
(Wawancara 02 Februari 2009)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak warga masyarakat yang malu untuk ikut pembelajaran dan masih banyak yang beranggapan bahwa program ini tidak penting. Hal tersebut sangat menghambat suksesnya program Pemberantasan Buta Aksara, karena apabila masyarakat sudah malu dan menganggap tidak penting maka otomatis mereka tidak respon terhadap program tersebut.

viii. Mata Pencaharian

Mata pencaharian musiman yang ada pada masyarakat sering mempengaruhi terhadap dorongan masyarakat untuk mengikuti program pendidikan. Pada saat musim mata pencaharian tertentu tiba, masyarakat cenderung lebih memilih mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dari pada mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara.

Seperti yang diungkapkan Ibu Endah Werdiningsih, S.Pd selaku tutor program

Pemberantasan Buta Aksara :

“Disini semangat belajarnya sangat kurang mbak, apalagi saat musim panen. Mereka lebih memilih memanen padi dari pada mengikuti pembelajaran. Saya juga tidak bisa memaksa karena mereka juga mencari makan.”

(Wawancara 02 Februari 2009)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program

Pemberantasan Buta Aksara juga terhambat masalah mata pencaharian warga belajarnya, dimana warga belajar lebih memilih mencari uang dari pada mengikuti proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan saat warga belajar merasa ada peluang mencari uang, maka mereka akan meninggalkan pembelajaran. Permasalahan ini tidak dapat dihindari dan tutor juga tidak berhak melarang karena warga belajar juga membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup.

### 3) Motivasi penduduk

Permasalahan yang paling mendasar dalam pemberantasan buta aksara yaitu rendahnya motivasi belajar penduduk buta aksara. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara, mereka tidak merasa membutuhkan pendidikan karena mereka menganggap itu tidak penting sehingga mereka kurang respon terhadap program ini.

Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo mengatakan sebagai berikut :

“Warga belajar itu sendiri kesadarannya kurang disamping basis pendidikannya sangat-sangat minim, mereka lebih senang ke sawah daripada belajar. Mereka berpikir dari pada waktu habis untuk belajar lebih baik waktu habis untuk merumput, sapinya kenyang. Ya motivasi yang masih sangat kurang seperti itu

mbak yang membuat kami kesulitan dalam memberi dorongan agar mereka mau belajar.”

(Wawancara 02 Februari 2009)

Ibu Letisia Masta S. Psi selaku tutor juga mengungkapkan bahwa motivasi warga masyarakat yang rendah ditunjukkan dengan jarang mereka datang ke lokasi pembelajaran dikarenakan hujan atau mereka mengemukakan alasan lain seperti tidak punya waktu karena sibuk :

“Memang masyarakat penyandang buta aksara disini kesadarannya masih sangat rendah mbak, pernah waktu hujan itu yang datang hanya satu orang. Yang lainnya tidak datang dengan alasan hujan. Selain itu ada juga yang tidak datang karena memang malas, atau alasannya sibuk merawat anaknya, sibuk masak. Pokoknya macam-macam alasannya, intinya motivasi mereka untuk belajar itu masih rendah mbak.” (Wawancara 02 Februari 2009)

Dari penuturan-penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi masyarakat yang rendah menjadi hambatan yang sulit diatasi oleh penyelenggara maupun para tutor. Dengan motivasi rendah, timbul pemikiran bahwa program Pemberantasan Buta Aksara tidak penting sehingga mereka akan berat hati untuk meluangkan waktu ikut pembelajaran.

Selain terdapat hambatan dalam pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara, terdapat pula faktor pendukung terlaksananya program pemerintah ini, yaitu :

a. Keaktifan Tutor

Tutor memegang peranan penting dalam pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo karena tanpa dukungan tutor maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Sejauh ini kinerja tutor pada kelompok belajar di Kecamatan Sukoharjo cukup memuaskan dilihat dari keuletan dan kesabaran tutor dalam

menghadapi warga belajar yang sebagian besar ibu-ibu tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini penuturan Bapak Saman Trisno Raharjo, S. Pd penyelenggara program Pemberantasan Buta Aksara di Kelurahan Bulakrejo :

“Kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran masih rendah mbak, banyak yang tidak mau datang karena malas atau malu. Untungnya tutornya yaitu Bu Letisia mau menjemput warga belajar satu persatu. Bu Letisia itu semangatnya tinggi mbak, dan cukup sabar menghadapi warga belajar yang memang masih sulit dan punya kesadaran rendah akan pendidikan. Kalau ada warga belajar yang tidak berangkat pasti dia jemput.” (Wawancara 07 Februari 2009)

Ibu Letisia Masta S. Psi tutor kelompok belajar di Desa Bulakrejo juga mengungkapkan hal yang sama :

“Di desa Bulakrejo ini kadang yang berangkat tidak lengkap. Tapi kalau ada yang sudah tiga kali tidak berangkat pasti saya datangi dan saya tanya kenapa tidak berangkat. Saya memberi mereka motivasi lagi, saya katakan kalau bisa baca tulis itu penting, ya buat ibu-ibu sendiri. Biar nanti kalau ada bantuan dari pemerintah yang membutuhkan kemampuan membaca dan menulis seperti mengisi formulir atau tanda tangan bisa diurus sendiri. Kebanyakan ibu-ibu itu mengandalkan suaminya saja yang mengurus hal seperti itu, kaum wanita hanya mengurus dapur. Tapi saya memberi pengertian kalau ibu-ibu juga perlu belajar supaya bisa mandiri tidak menggantungkan pada suami. Akhirnya mereka sadar dan berpikir tentang manfaatnya.” (Wawancara 07 Februari 2009)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pembelajaran salah satunya adalah tergantung keuletan tutornya dalam memberi motivasi warga belajarnya. Tutor harus mau mendatangi satu per satu dan menunjukkan semangat yang tinggi. Dengan begitu warga belajar juga ikut termotivasi dan punya kesadaran untuk mengikuti pembelajaran.

b. Sarana dan Prasarana Warga Belajar

Kegiatan pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara ini sudah mendapat dukungan dari Pemerintah yang berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi warga belajar sehingga para warga belajar tidak dituntut untuk membayar sedikitpun. Sarana dan prasarana

tersebut sangat standar berupa alat tulis-menulis, namun sudah bisa mendukung berjalannya proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara. Seperti yang diungkapkan Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berikut ini :

“Peralatan tulis-menulis sudah disediakan dana dari Pemerintah mbak..sehingga warga belajar mengikuti kegiatan pembelajaran ini secara gratis dan tidak perlu membeli peralatan karena sudah menerima buku, pensil, penghapus, bolpoin. Kemudian untuk tempat pembelajaran dapat digunakan rumah warga, sedangkan papan tulis pun juga sudah ada biaya penyelenggaraannya. Sebenarnya dari Pemerintah sudah lengkap, walau baru berupa peralatan yang standar dan sederhana namun itu sudah mendukung dilaksanakannya PBA tadi karena materi pembelajarannya juga sangat sederhana.” (Wawancara 02 Februari 2009)

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa warga belajar sudah dipenuhi dalam hal sarana dan prasarannya, dalam artian sudah tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk warga belajar di Kecamatan Sukoharjo. Walaupun sarana dan prasarana masih bersifat sederhana namun sudah mampu mendukung proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara.

- Evaluasi Produk (*Product*)

Evaluasi produk mengukur dan menginterpretasi pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program sehingga kemudian dapat diketahui dampak dari pelaksanaan suatu program. Dalam evaluasi produk ini, hal yang dinilai adalah mengenai dampak dari pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut.

Dengan dilaksanakannya program Pemberantasan Buta Aksara maka dampak sosial



yang diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu berinisiatif dan memiliki kemandirian dalam kehidupannya sehingga tidak menggantungkan diri pada orang dan berpikiran untuk maju. Selain itu juga diharapkan masyarakat sudah memiliki kemampuan keaksaraan sehingga mampu melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keaksaraan dan mampu mengakses informasi dalam bentuk tulisan seperti koran dan majalah.

Setelah pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, dampak ekonomi yang diharapkan pemerintah bagi masyarakatnya adalah masyarakat mampu berwirausaha secara mandiri dengan bekal keterampilan yang telah diberikan selama program pemerintah ini berlangsung. Dengan begitu, apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat tercapai.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo :

“Dampak positif dari program PBA ini ya...tentunya masyarakat yang masih buta aksara sekarang jadi bisa membaca, menulis dan juga berhitung. Dengan mampunya masyarakat untuk membaca dan menulis, menjadikan mereka tidak mudah ditipu. Dampak secara administrasi, warga belajar jadi bisa melakukan kegiatan transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, misal : sudah bisa mengisi kuitansi, membaca bukti pembayaran. Pemberian materi keterampilan ya walaupun tidak semua warga belajar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, tapi ada sebagian warga belajar yang membuka usaha kecil-kecilan tentunya dengan modal seadanya, contohnya saja : ada yang menekuni usaha Tata Sungging, kemudian di daerah Bulakrejo itu juga ada warga belajar yang membuka usaha rambak setelah ikut pelatihan keterampilan.”  
(Wawancara 25 Februari 2009)

Hal tersebut diperkuat dengan penuturan Bapak Wardi salah satu warga belajar yang telah selesai mengikuti proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara :

“Saya mencoba usaha memproduksi rambak ini ya karena dulu saya pernah diajarkan praktek cara membuat rambak waktu mengikuti pembelajaran di rumahnya Ibu Triyani. Bu Triyani yang menyarankan kepada saya untuk membuka usaha rambak ini mbak..saya berpikir, tidak ada salahnya dicoba. Modalnya cuma sedikit mbak, jadi awalnya saya membuat rambak sesuai dengan permintaan saja. Saya mencoba membuat kemudian dititipkan di warung-warung di daerah sekitar sini saja, Alhamdulillah laku.”

(Wawancara 25 Februari 2009)

Dampak dari diselenggarakannya program Pemberantasan Buta Aksara ini juga dirasakan positifnya oleh Ibu Kembuk yang juga sebagai warga belajar dalam program pemerintah ini. Berikut penuturan Ibu Kembuk tentang dampak proses pembelajaran yang telah beliau ikuti :

“Sekarang saya sudah bisa menulis surat ijin untuk anak saya kalau dia tidak masuk sekolah. Dulu saya bingung minta tolong tetangga kalau mau membuat surat ijin. Dulu bu Gurunya mengajari saya cara membuat surat ijin tidak masuk sekolah. Awalnya saya tidak bisa terus waktu diajari, padahal sudah diajari berulang-ulang kali, lama-kelamaan saya bisa juga. Alhamdulillah...sekarang sudah bisa membuat sendiri walau agak tidak lancar nulisnya.”

(Wawancara 02 Februari 2009)

Dari penuturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak yang diharapkan pemerintah dengan diselenggarakannya program Pemberantasan Buta Aksara telah tercapai. Hal itu terbukti dengan adanya kemajuan warga belajarnya dibidang sosial maupun ekonomi, yaitu secara sosial masyarakat yang dulunya buta aksara sekarang telah mampu membaca, menulis, dan berhitung sedangkan secara ekonomi masyarakat mampu berwirausaha secara mandiri dengan menerapkan materi keterampilan fungsional yang telah diberikan dalam proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan tentang pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo beserta hasil evaluasinya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara meliputi :

a. Langkah Persiapan

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sukoharjo. Kemudian ditentukan siapa yang mau dan mampu menjadi penyelenggara dan tutor. Dari hasil sosialisasi, diperoleh 26 orang penyelenggara dan 26 tutor.

1) Pendataan Calon Warga Belajar

Dari pendataan calon warga belajar di Kecamatan Sukoharjo, terjaring 394 orang penyandang buta aksara.

2) Pengajuan Proposal

Penyelenggara mengajukan proposal penyelenggaraan program Pemberantasan Buta Aksara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo kemudian mengajukan proposal program Pemberantasan Buta Aksara tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Jika proposal disetujui, maka antara penyelenggara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menandatangani akad kerja sama.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- 1) Tahap Pemberantasan (Tahap I)
- 2) Tahap Pembinaan (Tahap II)
- 3) Tahap Pelestarian (Tahap III)

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilaksanakan secara berkala yaitu mingguan, bulanan, dan pada akhir pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan pada akhir pembelajaran yaitu memberi semacam tes untuk melihat kemampuan warga belajar dalam menerima pembelajaran.

d. Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut

Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh penyelenggara dan tutor yaitu dengan memberikan laporan pada Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo secara berkala. Hal-hal yang dilaporkan antara lain : proses belajar mengajar, perkembangan kemajuan warga belajar, kegiatan dan hasil belajar, dan hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Tindak lanjut Pemerintah dalam menuntaskan program Pemberantasan Buta Aksara adalah menyelenggarakan Jaring Garap.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara

a. Evaluasi Konteks (*Contex*), yang mengarah pada penilaian :

1) Tujuan Program

Secara umum, apa yang menjadi tujuan program Pemberantasan Buta Aksara ini telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat penyandang buta aksara. Adanya kesesuaian tujuan pemerintah untuk memberantas buta aksara dan keinginan masyarakat untuk mau mengikuti proses pembelajaran agar dapat mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta memperoleh keterampilan

fungsional yang sesuai dengan potensi wilayah di daerahnya masing-masing.

2) Sasaran Pelaksanaan Program

Sasaran program Pemberantasan Buta Aksara sudah sesuai dengan tujuannya. Warga belajar yang mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pelaksana program Pemberantasan Buta Aksara yaitu warga buta aksara usia diatas 15 tahun.

b. Evaluasi Masukan (*Input*), hal-hal yang dievaluasi :

1) Kondisi Kelompok Sasaran

Warga belajar memiliki motivasi belajar yang sangat rendah sehingga sering tidak menepati jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dibutuhkan keaktifan tutor untuk mensukseskan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara, karena masyarakat merasa tidak membutuhkan dan tidak merasa rugi walaupun tidak mengikutinya.

2) Tingkat Pendidikan Tutor

Semua tutor program Pemberantasan Buta Aksara telah memenuhi kriteria umum sebagai seorang tutor, bahwa kriteria umum untuk menjadi tutor dalam program Pemberantasan Buta Aksara adalah berpendidikan minimal SLTA.

3) Sarana dan Prasarana

Sudah tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk warga belajar program Pemberantasan Buta Aksara, walaupun masih bersifat sederhana namun sudah mampu mendukung proses pembelajaran.

4) Dana Pelaksanaan Program

Pada prakteknya, dana yang diperoleh dari Pemerintah guna menyelenggarakan

program Pemberantasan Buta Aksara ini masih kurang dan terbatas, baik yang berkenaan dengan biaya belajar mengajar maupun honor tutor dan penyelenggara.

c. Evaluasi Proses (*Process*), mengarah pada penilaian :

1) Pelaksanaan Program

Proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara ada 3 tahap. Pada tiap tahap para tutor sebisa mungkin dapat memenuhi target sesuai batas kriteria penilaian yang harus dikuasai warga belajar. Hasil uji kompetensi dinyatakan bahwa warga belajar yang telah mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara telah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan Pemerintah.

2) Hambatan Pelaksanaan Program

Faktor penghambat pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a) Nilai-nilai sosial
- b) Mata Pencaharian
- c) Motivasi Penduduk

Terdapat pula faktor pendukung dalam pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara, yaitu :

- a) Keaktifan Tutor
- b) Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pembelajaran

d. Evaluasi Produk (*Product*)

Hal yang dievaluasi adalah dampak pelaksanaan program. Dampak pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yaitu adanya kemajuan warga belajarnya dalam bidang sosial maupun ekonomi.

## B. Saran

Penulis memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara :

1. Sosialisasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo sebaiknya lebih ditingkatkan, yaitu dengan melakukan sosialisasi rutin di tiap Kelurahan tentang manfaat program Pemberantasan Buta Aksara. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan terjangungnya warga buta aksara dan menjadikan mereka mempunyai kesadaran yang tinggi dalam mengikuti program pemerintah ini.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo selaku motivator dan fasilitator program Pemberantasan Buta Aksara sebaiknya mengkoordinasikan dan mengusulkan peningkatan anggaran agar pelaksanaan program dapat ditingkatkan. Hal itu disebabkan karena dana dari pemerintah kurang mencukupi untuk pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara.
3. Walaupun program Pemberantasan Buta Aksara merupakan Pendidikan Non Formal, namun Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan para penyelenggara dan tutor seperti layaknya Pendidikan Formal dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan honor yang cukup.
4. **Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Sukoharjo sebaiknya lebih memperhatikan perkembangan warga belajarnya setelah selesai mengikuti program ini, terutama terhadap realisasi tujuan pemerintah untuk memandirikan warganya agar benar-benar mampu meningkatkan ekonomi warga belajarnya, dengan cara memberi dorongan untuk membuka usaha dan pinjaman modal kepada warga belajar.**



**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo. 2005. *Penduduk Akhir Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo*. Sukoharjo : BPS Kabupaten Sukoharjo.

Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Pedoman Pelaksanaan : Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*. Jakarta.

Djudju Sudjana. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : UNS Press.

Hadari Nawawi. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

J. Salusu. 1998. *Pengembangan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : PT. Gramedia.

M. Hariwijaya dan Triton. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah : Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta : Tugu Publisier.

Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pariata Westra. 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sumber Lain :

Harry Hikmat, "Monitoring dan Evaluasi Proyek" online (<http://www.m-e-monev.com>). Diakses : 02

November 2008.

\_\_\_\_\_. *Pentingnya Evaluasi*. [http://www.yakita.or.id/tampil\\_tanya\\_jawab.php](http://www.yakita.or.id/tampil_tanya_jawab.php). Diakses : 02 November 2008.

Suara Merdeka, "Tingkat Buta Aksara Penduduk Kabupaten Tegal" online (<http://pemkabtegal.go.id/butaaksara0932.html>). Diakses : 03 Agustus 2008.

Shanty, "Pentingnya Pendidikan". <http://www.google.com/gwt/n?client=ms-sonyericsson&q=Pentingnya+pendidikan&channel=bm&hl=en&ct=res&oi=blended&sa=X&ei3kBpSsCHPJe66QO3vIOPAg&cd=1&resnum=1&rd=1&u=http%3A%2F%2Fsearchengines.com%2F0607shanty.html>. Diakses : 24 Juli 2009.

Jurnal Internasional :

<http://www.elsevier.com>

- Gene Shackman. 2007. *What is Program Evaluation*. p. 101. Vol. 11. Washington. [http://www.elsevier.com/wps/find/journalsdescription.cws\\_Journal706817/evaluation#description](http://www.elsevier.com/wps/find/journalsdescription.cws_Journal706817/evaluation#description). Diakses Tanggal : 01 Mei 2009.

<http://www..sagepub.com>

e. Thomson Reuters. 2007. *Evaluation: The International Journal of Theory, Research, and Practice*. London, UK : Tavistock Institute. <http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200757>. Diakses tanggal : 01 Mei 2009.